



**PENGARUH PDRB, BELANJA MODAL DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
(STUDI KASUS: EKS KARESIDENAN BESUKI)**

SKRIPSI

Oleh :

Septian Jefri Alif Utama

NIM: 110810101130

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH PDRB, BELANJA MODAL DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
(STUDI KASUS: EKS KARESIDENAN BESUKI)**

SKRIPSI

Disusun Guna Sebagai Persyaratan Tugas Akhir Mahasiswa dan Sebagai Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Septian Jefri Alif Utama

NIM: 110810101130

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sri Yuniati dan Ayahanda Cholid yang tercinta;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember;

MOTO

Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?”. Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib”.

(terjemahan surat Al-Maidah ayat 116)

“Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan binatang-binatang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintahNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya”

(terjemahan surat An-Nahl ayat 12)

“Berdoa itu, jangan seperti meminta matahari diterbitkan. Padahal, kita tahu ini masih berada pada waktu maghrib. Berdoa itu harus sesuai dengan kadar usaha dan ibadah”.

(Gus Baiqun)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Jefri Alif Utama

NIM : 110810101130

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan (Studi Kasus: Eks Karesidenan Besuki) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 September 2015

Yang menyatakan,

Septian Jefri Alif Utama

NIM: 110810101130

SKRIPSI

**PENGARUH PDRB, BELANJA MODAL DAN KEMISKINAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(STUDI KASUS: EKS KARESIDENAN BESUKI)**

Oleh:

**Septian Jefri Alif Utama
NIM: 110810101130**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Teguh Hadi Priyo, SE., M.si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Lilis Yuliati, SE., Msi

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus: Eks Karesidenan Besuki)
Nama Mahasiswa : Septian Jefri Alif Utama
NIM : 110810101130
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 11 September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Teguh Hadi Priyo, SE., M.si

NIP: 19700206 199403 1 002

Dr. Lilis Yuliati, SE., Msi

NIP: 19690718 199512 2 001

Ketua Jurusan,

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

NIP: 19641108 198902 2 000 1

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH PDRB, BELANJA MODAL DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS: EKS. KARESIDENAN BESUKI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Septian Jefri Alif Utama
NIM : 110810101130
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal:

25 SEPTEMBER 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji:

1. Ketua : Dra. Anifatul Hanim M.si (.....)
NIP: 1965073 0199103 2 00 1
2. Sekretaris : Drs. Sonny Sumarsono, MM (.....)
NIP: 1958042 4198802 1 00 1
3. Anggota : Prof. Dr. Moch. Saleh, M.sc. (.....)
NIP: 1956083 1198403 1 00 1

Mengetahui/Menyetujui
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.si
NIP: 1963061 419900 1 00 1

Septian Jefri Alif Utama

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Paradigma yang berkembang pada saat ini adalah pembangunan manusia dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki tahun 2004-2013 serta menganalisis pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan serta pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki tidak ada yang berada pada level *lower* dan terus mengalami peningkatan pada periode tersebut. Pengaruh PDRB secara regresi berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan dan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan sedangkan secara struktural PDRB sangat berpengaruh karena memiliki pengaruh total yang lebih besar dari belanja modal terhadap kemiskinan. Pengaruh PDRB dan belanja modal secara regresi juga berpengaruh secara signifikan sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara struktural PDRB memiliki pengaruh yang sangat besar karena memiliki pengaruh total yang lebih besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia dibandingkan belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata kunci: PDRB, belanja modal, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia

Septian Jefri Alif Utama

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

Paradigm developed at this time is the human development viewed from the quality of human resources as measured by the Human Development Index. The purpose of this study was to determine the development of the human development of the Human Development Index in the region of the former district of besuki years 2004-2013 and to analyze the effect of PDRB and capital expenditure against poverty and to analyze to effect of PDRB, capital spending and poverty on the Human Development Index. The results showed the development of the Human Development Index in the region of the former district of besuki not seconds are at the lower level and continue to increase in the period. The effect of PDRB reggression significant influence and capital expenditure has no effect significantly to poverty while structurally very influential PDRB on poverty because it has a greater influence than the total the capital expenditure on poverty . the effect of PDRB and capital expenditure regression significantly affect Human Development Index while poverty does not significantly affect the Human Development Index. Structural PDRB has a very big influence on the Human Development Index than the influence of the total capital expenditure and poverty on the Human Development Index.

Key words: *PDRB, capital expenditure, poverty, Human Develoment Index*

RINGKASAN

Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus: Eks. Karesidenan Besuki); Septian Jefri Alif Utama; 110810101130; 2015; 121 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Paradigma yang berkembang bahwa pembangunan ekonomi pada saat ini diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia di setiap negara. Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan meningkatkan produktivitas penduduk dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2001 yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa. Jumlah penduduk tersebut juga sejalan dengan jumlah kemiskinan yang terjadi yang pada kenyataannya adalah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk miskin cukup besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Meskipun memiliki jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar tetapi juga masih terjadi peningkatan pada rasio Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia dan kenaikan jumlah

penduduk miskin akan berdampak pada setiap daerahnya termasuk di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur salah satunya pada wilayah Eks Karesidenan Besuki. Wilayah Eks Karesidenan Besuki meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Setiap kabupaten atau kota dalam otonomi daerah memiliki kemampuan mengelola anggarannya dalam kegiatan pembangunan termasuk di wilayah Eks Karesidenan Besuki. Anggaran tersebut salah satunya adalah belanja modal yang memiliki tujuan untuk menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan PDRB pada daerah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat yaitu apabila masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi, kesehatan yang terjamin dan daya beli masyarakat yang tinggi pula yang diukur dengan indeks pembangunan manusia.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Eks Karesidenan Besuki yang meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Objek penelitian ini dibagi dalam dua model penelitian yaitu, pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan dan pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2004 sampai 2013. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi dengan menggunakan data panel dan analisis struktural dengan menggunakan analisis *path* atau analisis lintas.

Hasil penelitian menunjukkan pada model pertama yaitu pengaruh PDRB dan belanja modal secara regresi PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan ($p\text{-value} < 0,05$) dan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan ($p\text{-value} > 0,05$) secara struktural yang ditunjukkan melalui analisis lintas PDRB memiliki pengaruh yang besar terhadap kemiskinan dengan koefisien lintas 1,058 dan pengaruh total sebesar 0,537 sedangkan belanja modal memiliki koefisien lintas sebesar 0,026 dan memiliki pengaruh total sebesar 0,0921.

Pada model kedua yaitu, pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara regresi PDRB memiliki pengaruh

secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ($p\text{-value} < 0,05$), belanja modal juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ($p\text{-value} < 0,05$) sedangkan kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia ($p\text{-value} > 0,05$). Secara struktural pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan koefisien lintas sebesar 4.282 dan pengaruh total sebesar 0,748, belanja modal memiliki koefisien lintas sebesar 0,509 dan pengaruh total sebesar 0,698 sedangkan kemiskinan memiliki koefisien lintas sebesar 0,6508 dan pengaruh total sebesar -0,0536.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Azza Wa Jalla, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Studi Kasus: Eks Karesidenan Besuki)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Teguh Hadi Priyo S,E,. M,si selaku Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
2. Dr. Lilis Yulianti S,E,. Msi selaku Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
3. Fajar Wahyu Prianto S,E,. M.E selaku Dosen Pembimbing Informal terima kasih atas bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Dr. Regina Niken Wilantari S,E., M,si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terima kasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan banyak bantuan berupa penyediaan data dan sebagainya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Dr. M Fathorrazi S,E,. M,si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Jember;
7. Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
8. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jember, terima kasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa;

9. Ibunda Sri Yuniati dan Ayahanda Cholid yang telah membimbing dari kecil dan sekarang hingga dewasa;
10. Adik Olivia Dwi Ananda Hidayati dan adik sepupu Musrifania Hanna Runtika serta Muhammad Haidar Muzadi, terima kasih atas dukungan dan doanya;
11. Keluarga di Sidoarjo, kakek dan nenek, Bapak Bedjo Utomo dan Alm. Ibu Sami'a. Bibi dan paman, Ibu Sri Martini dan Bapak Muslichuddin dan semua keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungannya.
12. Teman-teman di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan angkatan 2011, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama penulis menjadi mahasiswa;
13. Rekan di Konsentrasi Ekonomi Regional 2011, Fitya, Amelia, Bunga, Henggar, Yohan, Wawan, Vighar, Rendra dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
14. Guru dan teman TK. Dharma Wanita Pakusari angkatan 1999, SDN Kertosari 1 angkatan 2000, SMPN 4 Jember angkatan 2005 dan MAN Jember 1 angkatan 2008;
15. Sahabat karib saya Dodik Bagus Purwanto terima kasih atas motivasinya;
16. Keluarga di kelompok KKN 60 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Irma Dwi Lestari, Prayudi Rahardjo, Nur Aini, Fifin Lujjatil, Effi Luciana, Khoirul Anwar, Khalish Hafid, Ali Hasan dan Benny.
17. Sucik Ayu Warisma, terima kasih atas semua yang diberikan selama kuliah.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB 2. PEMBAHASAN	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	7
2.1.2 Teori pertumbuhan ekonomi	8
2.1.3 Teori Pertumbuhan Baru	10

2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah	11
2.1.5 Belanja Modal	12
2.1.6 Kemiskinan	13
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia	17
2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya	19
2.3 Kerangka konseptual	22
2.4 Hipotesis	23
BAB 3. METODE PENELITIAN	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.1.1 Jenis Penelitian	24
3.1.2 Unit Analisis Dan Ruang Lingkup	24
3.1.3 Jenis Sumber Data	24
3.1.4 Populasi Penelitian	25
3.2 Metode Analisis Data	25
3.2.1 Analisis Deskriptif	25
3.2.2 Analisis Data Panel	25
3.2.3 Model Regresi Data Panel	27
3.2.4 Analisis Regresi	28
3.2.5 Analisis Path	34
3.3 Definisi Operasional	38
BAB 4. PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum	40
4.1.1 Keadaan Geografis Wilayah Eks Karesidenan Besuki	41
4.1.2 Keadaan Perekonomian Wilayah Eks Karesidenan Besuki	43
4.1.3 Keadaan Penduduk Wilayah Eks Karesidenan Besuki	50

4.1.4 Realisasi Belanja Modal Wilayah Eks Karesidenan Besuki	57
4.2 Analisis Data	58
4.2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Eks Karesidenan Besuki	58
4.2.2 Model Data Panel	59
4.2.3 Analisis Regresi Data Panel	62
4.2.4 Uji Statistik	67
4.2.5 Uji Asumsi Klasik	74
4.2.6 Analisis Path	83
4.3 Pembahasan	91
4.3.1 Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan	92
4.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan	93
4.3.3 Pengaruh PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	93
4.3.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	94
4.3.5 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	95
BAB 5. PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Jumlah kemiskinan terbanyak 5 provinsi di Indonesia	2
1.2 IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2012	3
1.3 Jumlah penduduk miskin Eks Karesidenan Besuki	4
2.1 Tinjauan peneliti sebelumnya	21
4.1 PDRB Kabupaten Jember	44
4.2 PDRB Kabupaten Banyuwangi	46
4.3 PDRB Kabupaten Bondowoso	48
4.4 PDRB Kabupaten Situbondo	49
4.5 Jumlah penduduk Kabupaten Jember	51
4.6 Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi	52
4.7 Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso	54
4.8 Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo	56
4.9 Realisasi belanja modal di wilayah Eks Karesidenan Besuki ...	58
4.10 Perkembangan IPM di wilayah Eks Karesidenan Besuki	59
4.11 Uji <i>redundant fixed effect</i> model kemiskinan	60
4.12 Uji Hausman <i>test</i> model kemiskinan	60
4.13 Uji <i>redundant fixed effect</i> model IPM	61
4.14 Uji Hausman <i>test</i> model IPM	61
4.15 Regresi data panel model kemiskinan	62

4.16	Regresi data panel model IPM	65
4.17	Uji F model kemiskinan	68
4.18	Uji F model IPM	69
4.19	Uji t model kemiskinan	70
4.20	Uji t model IPM	71
4.21	Koefisien determinasi model kemiskinan	73
4.22	Koefisien determinasi model IPM	70
4.23	Uji multikolinieritas model kemiskinan	75
4.24	Uji multikolinieritas model IPM	76
4.25	Uji heteroskedastisitas model kemiskinan	77
4.26	Uji heteroskedastisitas model IPM	78
4.27	Uji autokorelasi model kemiskinan	79
4.28	Uji autokorelasi model IPM	80
4.29	Uji normalitas model kemiskinan	81
4.30	Uji normalitas model IPM	82
4.31	Regresi model penuh model kemiskinan	83
4.32	Hasil analisis regresi model kemiskinan	83
4.33	Regresi model penuh model IPM	87
4.34	Hasil analisis regresi model IPM	87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Lingkaran setan kemiskinan	16
2.2 Bagan kerangka konseptual	23
3.1 Daerah pengujian autokorelasi	33
3.2 Analisis jalur penelitian	38
4.1 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember	45
4.2 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi	47
4.3 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso	48
4.4 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo	50
4.5 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember	51
4.6 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi	53
4.7 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bondowoso	55
4.8 Jumlah penduduk miskin Kabupaten Situbondo	57
4.9 Diagram lintas penelitian	91

DAFTAR LAMPIRAN

A. Data Penelitian	103
B. Data Logaritma Penelitian	105
C. Uji Data Panel Model Kemiskinan	107
D. Uji Data Panel Model IPM	109
E. Analisis Regresi Data Panel	111
F. Uji F	113
G. Uji t	114
H. Koefisien Determinasi	115
I. Uji Multikolinieritas	116
J. Uji Heteroskedastisitas	117
K. Uji Autokorelasi	119
L. Uji Normalitas	120
M. Uji Path	121

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan alat keberhasilan suatu negara yang tidak terlepas dari beberapa faktor dan memiliki tujuan. pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari pembangunan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Pada masa tradisional pembangunan ekonomi diukur dengan pertumbuhan GNP baik secara agregat maupun perkapita. Dengan pertumbuhan GNP maka akan menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada meningkatnya berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip tersebut dikenal dengan *trickle down effect*. Sedangkan pandangan ekonomi baru menganggap bahwa indikator pembangunan ekonomi bukan hanya GNP tetapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan maupun penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Maryani:2011)

Paradigma yang berkembang bahwa pembangunan ekonomi pada saat ini diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi (Maryani:2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia di setiap negara. Indeks pembangunan manusia diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan dalam setiap negara maupun wilayah berbeda-beda yang disebabkan karena adanya *heterogenitas* individu, disparitas geografi serta kondisi masyarakat yang beragam. Keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi dalam sistem perekonomiannya (Mirza:2012).

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan meningkatkan produktivitas penduduk dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa. Jumlah penduduk tersebut juga sejalan dengan jumlah kemiskinan yang terjadi yang pada kenyataannya adalah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk miskin paling besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Kemiskinan Terbanyak 5 Provinsi di Indonesia Tahun 2013

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase (%)
Jawa Timur	4.865.820	12,73
Jawa Tengah	4.704.870	14,44
Jawa Barat	4.382.650	9,61
Sumatera Utara	1.390.800	10,39
Lampung	1.134.280	14,39

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Pada akhir 2013 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kemiskinan yang relatif cukup tinggi yaitu sebesar 4.856.820 dengan persentase 12,73% dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 419428,45 milyar dan lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya (BPS:2013). Meskipun memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya tetapi masih tingginya jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Timur sehingga diperlukan perbaikan dalam kinerja ekonomi salah satunya peningkatan dalam pembangunan manusia yang akan digambarkan dalam rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia dalam ekonomi yaitu kinerja pemerintah melalui program-programnya harus mencakup pemerataan semua wilayah di Provinsi Jawa Timur yang meliputi kabupaten dan kota salah satunya melalui otonomi daerah.

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Namun

demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar IPM terus mengalami peningkatan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Pada komponen angka harapan hidup masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi masyarakat masih cukup rendah. Artinya, banyak penduduk yang belum benar-benar memperhatikan kesehatan. Apabila masalah tersebut tidak ditangani dengan serius akan menyebabkan penurunan kualitas angka harapan hidup dan berakibat pula pada penurunan nilai Indeks Pembangunan Manusia. IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2012 dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 : IPM Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2012

Uraian	2010	2011	2012
IPM	71,62	72,18	72,54
a. Indeks Kesehatan	74,34	74,77	75,15
b. Indeks Pendidikan	74,98	75,33	75,73
c. Indeks Daya Beli	65,54	66,43	66,73

Sumber: BPS Jawa Timur, 2013

Kenaikan IPM di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu kebijakan atau program yang dicanangkan dan dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Program tersebut diantaranya program dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana lainnya. Keberhasilan program tersebut juga dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan sarana yang dijalankan dalam program pemerintah tersebut.

Kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2001 yang ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Daerah diberi wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi terciptanya kemakmuran penduduk di wilayahnya dengan mempertimbangkan sejumlah faktor,

seperti potensi sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat (Fatmasari, 2007). Otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk setiap daerah mengelola anggarannya termasuk dalam belanja modal dan pengalokasian program pembangunan. Tujuan dari program pembangunan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi jumlah kemiskinan. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi anggaran dalam penyusunan anggaran (Suyatno dalam Cristhy et al).

Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia dan kenaikan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur akan berdampak pada setiap daerahnya termasuk di setiap kabupaten dan kota. Pada beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur masih memiliki jumlah kemiskinan yang cukup tinggi hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur salah satunya pada kabupaten dan kota di Eks Karesidenan Besuki. Pada daerah Eks karesidenan Besuki jumlah kemiskinan masih cukup tinggi seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk Miskin Eks Karesidenan Besuki Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan
Kab. Jember	277,39	11,63	260.106
Kab. Banyuwangi	151,60	9,57	276.648
Kab. Bondowoso	114,80	15,23	290.792
Kab. Situbondo	89,98	13,59	240.085

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Jumlah penduduk miskin pada Eks karesidenan Besuki yang terdiri dari Kabupaten Jember sebesar 277,39, Kabupaten Banyuwangi sebesar 151,60, Kabupaten Bondowoso sebesar 114,80 dan Kabupaten Situbondo sebesar 89,98. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat distribusi kesejahteraan masyarakat pada setiap daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur khususnya di Eks

Karesidenan Besuki belum optimal meskipun terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian perlu adanya kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan anggarannya dalam program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menekan angka kemiskinan pada setiap kabupaten atau kota pada daerah Eks Karesidenan Besuki.

Melihat fenomena diatas, pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan dikarenakan kualitas sumber daya pada suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pemabangunan wilayahnya. Dari penjelasan diatas maka diperlukan penelitian lebih lanjut dan saya tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (studi kasus: Eks Karesidenan Besuki).

1.2 Rumusan Masalah

Otonomi daerah menjadikan setiap kabupaten atau kota pada setiap daerah memiliki kemampuan untuk mengelola daerahnya yang meliputi kebijakan dalam pengalokasian anggaran dan sebagainya. Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa daerah yang dahulunya merupakan karesidenan salah satunya yaitu, Eks Karesidenan Besuki. Eks Karesidenan Besuki meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Situbondo.

Kabupaten atau kota dalam otonomi daerah memiliki kemampuan mengelola anggarannya dalam kegiatan pembangunan. anggaran tersebut salah satunya adalah belanja modal yang memiliki tujuan untuk menekan jumlah kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat yaitu apabila masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi, kesehatan yang terjamin dan daya beli masyarakat

yang tinggi pula yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Dari uraian tersebut dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah Eks Karesidenan Besuki?
2. Seberapa besar Pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap jumlah kemiskinan pada daerah Eks Karesidenan Besuki?
3. Seberapa besar pengaruh PDRB, belanja modal dan jumlah kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada daerah Eks Karesidenan Besuki?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah Eks Karesidenan Besuki.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap jumlah kemiskinan pada daerah Eks Karesidenan Besuki.
3. Mengidentifikasi pengaruh jumlah kemiskinan, PDRB dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks Karesidenan Besuki.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai referensi bagi kalangan akademisi sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang PDRB, belanja modal, jumlah kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai referensi, apabila melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat dikembangkan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan pembanding bagi peneliti lainnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan yang mencerminkan perubahan total suatu masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dan keinginan sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, pembangunan ekonomi secara teoritis diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

Menurut Jhingan, prasyarat pembangunan ekonomi yaitu:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri atau daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakat.
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, ketidaksempurnaan pasar menyebabkan *inmobilitas* faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.
3. Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai dengan meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
4. Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi dan diartikan sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.
6. Persyaratan sosio-budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.

7. Administrasi sebagai alat perlengkapan administrasi untuk perencanaan ekonomi pembangunan.

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah adalah proses kerja antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004:127). Oleh karena itu, sumber daya pada suatu daerah dapat dikelola dengan maksimal sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

A. Teori Adam Smith

Teori Adam Smith sering dianggap sebagai awal dari pengkajian masalah pertumbuhan secara sistematis (Sukirno, 2002:433). Menurut Adam Smith ada dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi. dalam pertumbuhan output, adam smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: sumber alam yang tersedia, sumber manusia, dan stok barang kapital yang ada. adam smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi (Sukirno, 1980:285).

Teori ini juga menjelaskan bahwa akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan lainnya. timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi penanaman modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara pesat. namun pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada (Kuncoro, 1997:38-39). Adam Smith juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nation* pada tahun 1776 menjelaskan bahwa

adanya penekanan pada penerapan harga yang fleksibel baik secara upah maupun barang.

Adam Smith juga menjelaskan bahwa faktor yang menentukan pembangunan adalah perkembangan penduduk. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dalam pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan meningkatkan proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

B. Teori Pertumbuhan Malthus

Gagasan Thomas Robert Malthus terdapat pada buku berjudul "*The Progress of Wealth*" dari bukunya yang berjudul "*Principle of Political Economy*" pada tahun 1820. Malthus tidak menganggap proses pertumbuhan ekonomi berjalan dengan sendirinya melainkan memerlukan usaha yang konsisten dari masyarakat. dalam kaitan dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk saja tidak cukup sebagai keberlangsungan proses pembangunan ekonomi dan mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Malthus berpendapat bahwa peranan produksi dan distribusi sebagai faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila kedua faktor tersebut dapat dikombinasikan secara tepat maka akan meningkatkan kesejahteraan dalam waktu singkat.

Kesimpulan dari teori yang dikemukakan oleh Malthus yaitu sebab utama keterbelakangan yaitu rendahnya tingkat konsumsi maupun tingkat permintaan efektif. Dalam proses pembangunan diperlukan peningkatan dalam sektor pertanian dan industri secara maksimal dan diperlukan kemajuan teknologi. Selain itu, diperlukan pula pendistribusian kesejahteraan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif dan peningkatan kerja melalui peningkatan dalam rencana kerja umum. Selain faktor

ekonomi terdapat pula faktor non ekonomi seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik dan hukum yang efisien yang dapat membantu di dua sektor tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi dan non ekonomi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Teori Perumbuhan Baru

Teori pertumbuhan baru menganalisis tentang pertumbuhan yang bersifat endogen. pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari sistem ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari hanya sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tetapi juga menyangkut modal manusia. Akumulasi modal juga merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi (Mankiw:2006).

Teori ini mengasumsikan juga bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal dan memacu peningkatan produktivitas (Todaro: 2000:121). Dengan kata lain peranan pemerintah dibutuhkan dalam pembangunan modal manusia untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam teori pertumbuhan baru ini terdapat persamaan sederhana yaitu:

$$Y = AK$$

Dalam rumus ini A mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi, sedangkan K melambangkan modal fisik dan modal manusia yang ada. Dalam rumusan ini ditekankan adanya kemungkinan bahwa investasi dalam modal fisik dan manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal yang positif dan peningkatan produktivitas (Todaro, 2000:122). Kenyataannya dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh

kesejahteraan yang lebih baik yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya (Rasidin K dan Bonar M dalam Saputra, 2011).

2.1.4 Teori Tentang Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari keseimbangan pendapatan nasional yaitu:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Menurut pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan dalam mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas tenaga kerja adalah tidak memadai. Tetapi harus diperhitungkan siapa saja yang bekerja atau meningkat pendapatannya. Pemerintah juga perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan pihak swasta (Dumairy:1997).

Dalam kebijakan fiskal pengeluaran pemerintah dikenal dengan kebijakan anggaran yang meliputi: anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam anggaran berimbang yaitu suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran ($G=T$). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari pendapatan sedangkan anggaran defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Apabila pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya (Mangkoesbroto 1994). Pengeluaran pemerintah terdiri dari:

1. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja dalam pembayaran hutang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.

2. Pengeluaran pembangunan yaitu, pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan dibidang sosial, ekonomi dan umum dan bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik secara fisik atau non fisik.

2.1.5 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembangunan baik berupa pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung, kendaraan dan lain-lain maupun pembangunan non fisik yaitu, penataran, pelatihan dan sebagainya.

Menurut Mardiasmo (2007:101) belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. Dalam PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 kategori yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik nama dan sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan hak atas tanah.

2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Pengeluaran yang digunakan untuk penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin tersebut siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Pengeluaran yang digunakan untuk penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud siap untuk digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengeleloaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud yaitu dalam kondisi yang siap untuk digunakan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan dan peningkatan kapasitas yang tidak dapat dikategorikan ke dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan juga pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.

2.1.6 Kemiskinan

A. Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata atau standar kesehatan dan standar pendidikan masyarakat

. Sajogyo (dalam Rejekiingsih:2011) membagi kemiskinan sebagai suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Abraham jenjang kebutuhan yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis atau kiebutuhan makan, minum, tempat berteduh, kesehatan, dan lain-lain.

2. Kebutuhan akan rasa aman, tenang, bebas dari rasa takut, jaminan keselamatan, mendapat pekerjaan, serta adanya peraturan yang memberikan bimbingan dan pengarahan dalam bertindak.
3. Kebutuhan akan rasa memiliki, diakui dan diterima oleh lingkungannya.
4. Kebutuhan akan karya diri sendiri dan prestasi.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri.

Berdasarkan jenjang kebutuhan manusia tersebut, seseorang dapat dikatakan miskin apabila kebutuhan fisiologisnya tidak terpenuhi.

B. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan dapat dilihat dari garis kemiskinannya. Garis kemiskinan merupakan suatu ukuran yang menyatakan bahwa besaran pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin apabila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan setiap negara berbeda-beda sehingga tidak ada garis kemiskinan yang berlaku umum.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat beberapa konsep garis kemiskinan, antara lain:

1. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dll).
3. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

C. Penyebab Kemiskinan

Friedman (dalam Rejekiingsih:2011) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial seperti modal yang produktif atau aset, sumber-sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan atau barang-barang dan pengetahuan atau keterampilan yang memadai, serta informasi yang berguna untuk memajukan kehidupannya. Penyebab timbulnya Kemiskinan dapat dibedakan menjadi:

1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan (Soetandyo dalam Rejekiingsih:2011). Dikatakan tidak menguntungkan karena tatanan ini tidak hanya merugikan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan dalam masyarakat.

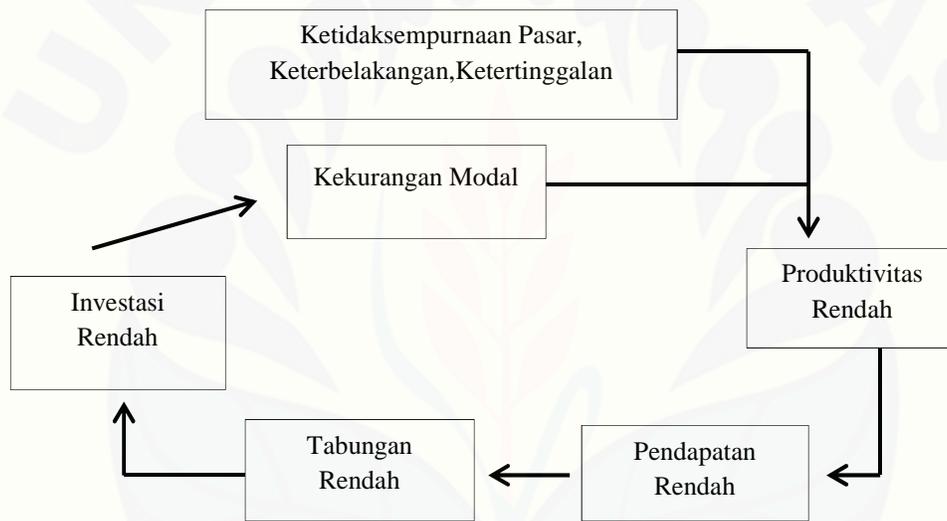
2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah diakibatkan karena faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan (Suyanto dalam Tri Wahyu Rejekiingsih:2011).

Menurut Sharp (dalam Kuncoro:1997) kemiskinan (dipandang dari segi ekonomi) disebabkan karena tiga hal:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia (SDM), kualitas SDM yang rendah diakibatkan rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan sehingga produktivitasnya rendah dan pada akhirnya upahnya rendah.
3. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal akan menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Hal tersebut akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya sehingga menimbulkan lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran kemiskinan yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 : Lingkaran Setan Kemiskinan

(Sumber: Kuncoro:1997)

Gambar kemiskinan dari Nurkse diatas menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dimana kemiskinan merupakan sebab akibat dari produktivitas rendah, pendapatan yang rendah, tabungan yang rendah, investasi rendah, kurangnya modal dan ketidaksempurnaan pasar.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar manusia yaitu:

1. Lamanya hidup yang diukur menurut harapan hidup pada saat lahir.
2. Tingkat pendidikan yang diukur dengan mengkombinasikan antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga)
3. Tingkat kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah).

Indeks ini pertama kali diperkenalkan pada 1990 oleh ekonom Pakistan bernama Mahbub Ul Haq. Formula perhitungan IPM adalah sebagai berikut (Mirza:2012):

$$IPM = \frac{1}{3} (X1 + X2 + Z) \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana:

X1 = Lamanya hidup

Z = Tingkat kehidupan yang layak

X2 = Tingkat pendidikan

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dengan menggunakan angka kelahiran dan kematian per tahun. Hal ini diharapkan akan dapat mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus tingkat kesehatan masyarakat. Dalam perhitungan indeks pendidikan menggunakan dua indikator yaitu angka melek huruf rata-rata lama sekolah (MYS). Angka melek huruf merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan jumlah orang yang sekolah dikalikan dengan lama sekolah kemudian dijumlahkan dan dibagi 20 (total lama sekolah). Setelah memperoleh nilai Lit dan MYS dilakukan penyesuaian agar memiliki nilai

pada skala 0 dan 1. Kemudian nilai kedua indikator tersebut dihitung dengan ketentuan UNDP dan dijadikan indeks pendidikan dengan perbandingan bobot Lit 2 dan MYS 1.

$$IP = \frac{2}{3} \text{ indeks Lit} + \frac{1}{3} \text{ indeks MYS} \dots\dots\dots (2.2)$$

Untuk mengukur standar hidup layak menggunakan *real* perkapita GDP *adjusted*. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan pertumbuhan ekonomi perkapita maka yang diukur hanya produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli *rill* masyarakat. Pengukuran daya beli masyarakat antar provinsi atau kabupaten/kota menggunakan data dari BPS yang berupa rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar sebanding dengan daerah lain (Francuari, 2012). Penyesuaian dengan indeks PPP berdasarkan ketentuan UNDP adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita pertahun untuk 27 komoditi dari Susenas Kor yang telah disesuaikan (=A)
2. Menghitung nilai pengeluaran *rill* (=B) dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun berangkutan
3. Metode perhitungan disesuaikan dengan menstandarkan GNP perkapita agar sebanding dengan indeks kemahalan wilayah yang disebut dengan daya beli per unit (PPP/unit). Data yang digunakan adalah data kuantum perkapita pertahun dari suatu komoditi yang terdiri dari 27 komoditi tersebut. Perhitungan PPP dapat digunakan rumus berikut:

$$PPP/unit = Ri \frac{\sum_{j=1}^{27} E(i,j)}{\sum_{j=1}^{27} P(i,j)Q(i,j)} \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana:

$E(i,j)$ = pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten/kota

$P(i,j)$ = harga komoditi j kabupaten/kota i

$Q(i,j)$ = jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten/kota i

Pemerintah memiliki peran sangat penting sebagai penyusun kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993).

2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Denny Sulitio Mirza (2012) Dengan Judul Penelitian Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Metode analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data panel dengan teknik *pooled least square model*, *fixed effect* dan *random effect*. Hasil dari penelitian ini yaitu perkembangan IPM pada periode 2006-2009 menunjukkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan hasil regresi menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Tri Maryani dengan judul penelitian analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisa dalam penelitian ini yaitu, dengan menggunakan data *time series* dan *cross section* atau juga biasa disebut dengan data panel. Hasil dari penelitian ini yaitu, pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan pada tahun 2007-2009 berpengaruh secara positif dan signifikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada tahun 2007-2009 berpengaruh secara positif dan signifikan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf dengan judul penelitian yaitu, Pengaruh Jumlah kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan

Pertumbuhan ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau. Metode analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, jumlah kemiskinan, tingkat upah minimum kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau, jumlah kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM, upah minimum kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM dan variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus dimaksimalkan agar IPM terus meningkat.

Nyoman Lylia Santika Dewi dengan judul penelitian yaitu, Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. Metode analisa dalam penelitian ini yaitu menggunakan data *time series* dan data *cross section*. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan daya beli masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Secara parsial indeks kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sementara indeks pendidikan dan daya beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Anonim dengan judul penelitian yaitu, Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi dengan data silang. Hasil dari penelitian ini yaitu belanja modal pada tahun 2006 dan 2007 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Jawa Barat baik secara parsial maupun simultan. Hasil ini mencerminkan bahwa dalam struktur alokasi APBD belum sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia menjadi arah dan kebijakan pembangunan. Hal ini secara langsung berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pendukung perbaikan IPM masih dirasa kurang. Dengan kata lain IPM di Jawa Barat belum terjawab secara tuntas.

Tabel. 2.1 : Tinjauan Peneliti Sebelumnya

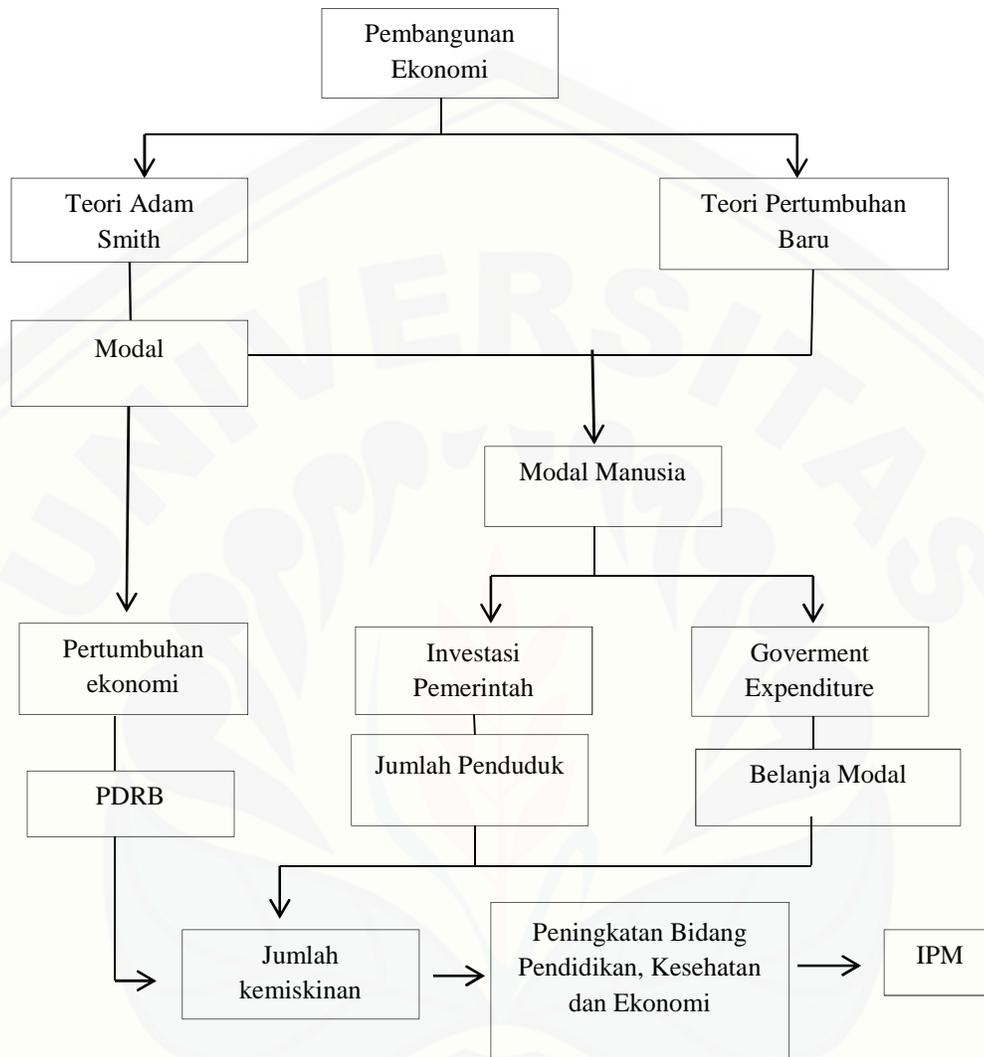
No.	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Denni Sulisty Mirza (2012), Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap IPM di Jawa Tengah Tahun 2006-2009	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pooled Least Square</i> • <i>Fixed effect</i> • <i>Random effect</i> 	Menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah dicapai oleh pemerintah. Sedangkan hasil regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM.
2.	Tri Maryani, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Regresi Linear dengan data <i>time series</i> dan data silang 	Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan pada tahun 2007-2009 berpengaruh secara positif dan signifikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada tahun 2007-2009 berpengaruh secara positif dan signifikan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah.
3.	Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf, Pengaruh Jumlah kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan ekonomi Terhadap IPM Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Linear Berganda 	Jumlah kemiskinan, tingkat upah minimum kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau, jumlah kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM, upah minimum kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap IPM dan variabel yang sangat besar pengaruhnya terhadap IPM adalah pertumbuhan ekonomi.
4.	Nyoman Lylia Santika Dewi, Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> • Regresi Linear dengan data <i>time series</i> dan data silang 	Secara simultan indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan daya beli masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Secara parsial indeks kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sementara indeks pendidikan dan daya beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5.	Anonim, Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan IPM Di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi dengan data silang 	Belanja modal pada tahun 2006 dan 2007 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Jawa Barat baik secara parsial maupun simultan.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini mengacu pada teori pembangunan yaitu teori pertumbuhan Adam Smith dan teori pertumbuhan baru.

Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith menjelaskan bahwa akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi penanaman modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari sistem ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari hanya sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tetapi juga menyangkut modal manusia. Akumulasi modal juga merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah akan berinvestasi dengan melihat banyaknya modal manusia dengan melakukan banyak program terutama program dalam meningkatkan produktivitas penduduk sehingga berakibat pada penurunan pada jumlah kemiskinan. Dalam mengurangi kemiskinan pula pemerintah akan mengalokasikan anggarannya dalam belanja modal dengan peningkatan sarana infrastruktur dalam rangka menunjang kegiatan masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan akan mengurangi jumlah kemiskinan. Dengan perbaikan dalam infrastruktur dan investasi modal manusia oleh pemerintah akan berakibat pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada suatu wilayah. Dari uraian diatas dapat digambarkan dalam bagan konseptual seperti dalam gambar 2.2 di bawah ini:



Gambar 2.2 : Bagan Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PDRB dan belanja modal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan.
2. PDRB, belanja modal dan jumlah kemiskinan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka untuk menjelaskan tentang suatu objek penelitian (Supranto:8).

3.1.2 Unit Analisis dan Ruang Lingkup.

Penelitian ini akan dilakukan pada Eks Karesidenan Besuki yang mencakup, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Dan Kabupaten Situbondo. Kajian penelitian ini meliputi PDRB dan belanja modal terhadap jumlah kemiskinan dan PDRB, belanja modal dan jumlah kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Eks Karesidenan Besuki.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan diperoleh dari instansi terkait. Pada penelitian ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data jumlah kemiskinan, belanja modal, PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia selama 10 tahun. Data pada penelitian ini adalah data panel yaitu data gabungan antara *time series* dan *cross section*. Data *time series* berupa data periode 2004 – 2013 sedangkan data *cross section* adalah data kabupaten atau kota Eks Karesidenan Besuki selama periode pengamatan. Pengambilan data dari tahun 2004 sampai 2013 dikarenakan pada tahun 2004 pelaksanaan otonomi daerah mulai berkembang dan pada awal tahun 2000an perekonomian daerah mulai stabil. Perekonomian di Provinsi Jawa Timur pada 2004-

2013 juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik, puncaknya pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

3.1.4 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya termasuk penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau sampel (Arikunto, 2002 dalam Mirza). Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah kabupaten/kota pada Eks Karesidenan Besuki yang meliputi 4 kabupaten/kota.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk penggambaran secara tegas tentang populasi yang menemukan distribusi dalam beberapa atribut.

3.2.2 Analisis Data Panel

Menurut Gujarati (dalam Mirza:2012), data panel atau yang disebut juga dengan data *longitudinal* merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Metode data panel adalah metode yang digunakan untuk analisis empirik dengan perilaku data yang dinamis. Terdapat 3 teknik pendekatan mendasar yang digunakan dalam analisis panel data:

1. Model Pooled Least Square (*Common Effect*)

Model ini dikenal dengan estimasi *common effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan model OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua model lainnya.

2. Model Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebutan model efek tetap atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga *Covariance Model*. Pada metode *fixed effect*, estimasi dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weighted*) atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobot atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section* (Gujarati, 2004). Penggunaan metode ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintrepetasi data. Pemilihan antar model *common effect* dengan *fixed effect* dapat dilakukan dengan pengujian *likelihood test ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan keputusan dengan menggunakan *fixed effect model*.

3. Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error. Karena hal inilah disebut model komponen *error* (*error component model*).

Dengan menggunakan model acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi efisien. Keputusan menggunakan model efek tetap atau pun acak digunakan Uji Hausman dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *fixed effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *fixed effect* dengan *random effect*.

3.2.3 Model Regresi Data Panel

Pada penelitian ini menggunakan dua model penelitian sehingga secara ekonometrika, hubungan antara PDRB dan belanja modal terhadap jumlah kemiskinan dan juga hubungan PDRB, belanja modal dan jumlah kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia pada eks Karesidenan Besuki dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan berikut:

Model pertama:

$$KMS = f (Pe, Bm) \dots\dots\dots (3.1)$$

Dari model diatas ditransformasikan ke dalam model ekonometrika sebagai berikut:

$$KMS = a_i + b_1 Pe_{it} + b_2 Bm_{it} + u_{it} \dots\dots\dots (3.2)$$

Model kedua:

$$IPM = f (Pe, Bm, KMS) \dots\dots\dots (3.3)$$

Dari model diatas ditransformasikan ke dalam bentuk model ekonometrika sebagai berikut:

$$IPM = a_i + b_1 Pe_{it} + b_2 Bm_{it} + b_3 KMS_{it} + u_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (persen)

KMS = Jumlah Kemiskinan (ribuan)

Pe = PDRB (Milyar)

Bm = Realisasi Belanja Modal (Milyar)

Adanya perbedaan satuan hitung maka model pertama ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma yaitu:

$$\text{Log (KMS)} = a_i + b_1 \text{Log}(Pe_{it}) + b_2 \text{Log (Bmit)} + u_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

Analisis regresi dalam model kedua juga menggunakan model persamaan regresi yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma. Sehingga persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Log (IPM)} = a_i + b_1 \text{Log}(Pe_{it}) + b_2 \text{Log (Bmit)} + b_3 \text{Log (KMSit)} + u_{it} \dots\dots\dots (3.6)$$

3.2.4 Analisis Regresi

Analisis regresi merupakan studi ketergantungan dari suatu variabel *dependent* terhadap satu atau lebih variabel *independent* (penjelas) dengan tujuan mengestimasi dan/atau memperkirakan nilai rata-rata variabel *dependent* dari nilai yang diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas (Gujarati,2010:20).

Untuk mengetahui seberapa besar PDRB (Pe) dan belanja modal (Bm) berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan (KMS), dan juga PDRB (Pe), belanja modal (Bm) dan jumlah kemiskinan (KMS) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks Karesidenan Besuki maka diperlukan terlebih

dahulu penaksiran model. Pengujian dilakukan meliputi *likelihood test ratio* untuk memilih antar model *common effect* dengan *fixed effect* serta *hausman test* untuk memilih antar model *fixed effect* dan *random effect*. Pengujian hasil penaksiran model diujikan dengan menggunakan *software e-views* yang meliputi:

1. Redudant Fixed Effect – Likelihood Ratio

Pengujian ini adalah untuk mengetahui model terbaik antara model *common effect model* dan *fixed effect model*

2. Corelated Fixed Effect – Hausman Test

Pengujian ini adalah untuk melihat model terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model* dengan menggunakan *Hausman Test*.

Selain serangkaian uji tersebut, pemilihan model juga dilakukan dengan melihat uji *godness fitnya*.

A. Uji Statistik

Uji statistik terdiri dari pengujian terhadap koefisien parsial (uji t), pengujian regresi bersama (uji F), dan pengujian determinasi (R^2).

A.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel *independent* yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel *dependent*. Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (N - 1)}$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel yang diestimasi termasuk konstanta.

N = Jumlah observasi.

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. H0 diterima dan H1 ditolak apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H0 ditolak dan H1 diterima apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

A.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh *independent* terhadap variabel *dependent* secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Nilai t-hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{bi - bi *}{SE (bi)}$$

Keterangan:

- bi = Parameter yang diestimasi.
- $bi *$ = Nilai hipotesis dari bi ($H_0 : bi = bi *$)
- $SE (bi)$ = Simpangan baku bi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika t-hitung $>$ t-tabel maka H0 ditolak, artinya salah satu variabel *independent* mempengaruhi variabel *dependent* secara signifikan.
2. Jika t-hitung $<$ t-tabel maka H0 diterima, artinya salah satu variabel *independent* tidak mempengaruhi variabel *dependent* secara signifikan.

Kriteria pengujian:

1. Dengan tingkat keyakinan 5%, apabila nilai t-statistik $>$ t-tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial variabel *independent* mempengaruhi variabel *dependent*.
2. Dengan tingkat keyakinan 5%, apabila nilai t-statistik $<$ t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial variabel *independent* tidak mempengaruhi variabel *dependent*.

A.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Konsep *Ordinary Least Square* (OLS) adalah meminimumkan residual, sehingga diperoleh korelasi yang tinggi antar variabel *dependent* dan variabel *independent*. Nilai R^2 yang sempurna dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel *independent* yang dimasukkan dalam model dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai R^2 yang lebih kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel *independent* dalam menjelaskan variasi variabel *dependent* sangat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati satu, berarti variabel *independent* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel *dependent*.

B. Uji Asumsi Klasik

Hasil analisis regresi linear berganda yang signifikan sudah dapat menentukan bahwa model regresi yang diperoleh telah dapat menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Untuk memperjelas dan memperkuat pengaruh dari hasil regresi yang diperoleh maka digunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut disebut juga dengan uji diagnosis. Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.

B.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Jika multikolinieritas itu sempurna maka setiap koefisien regresi dari bebas tidak dapat menentukan standar error batasnya. Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinieritas melihat bahwa R^2 yang tinggi

akan tetapi t-statistiknya kecil bahkan cenderung tidak signifikan. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara nilai R^2 parsial dengan nilai R^2 regresi utama. Apabila nilai R^2 regresi parsial lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut terjadi multikolinieritas. Ada beberapa dampak terjadinya multikolinieritas, yaitu:

1. Estimator masih bersifat *Blue* karena nilai varian dan kovarian besar.
2. Nilai t-hitung statistik variabel independen ada yang tidak signifikan karena interval estimasi cenderung lebih besar sehingga terdapat kesalahan pengujian hipotesis.
3. Nilai koefisien determinasi R^2 cenderung mempunyai nilai besar namun banyak variabel independen yang tidak signifikan.

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinieritas adalah:

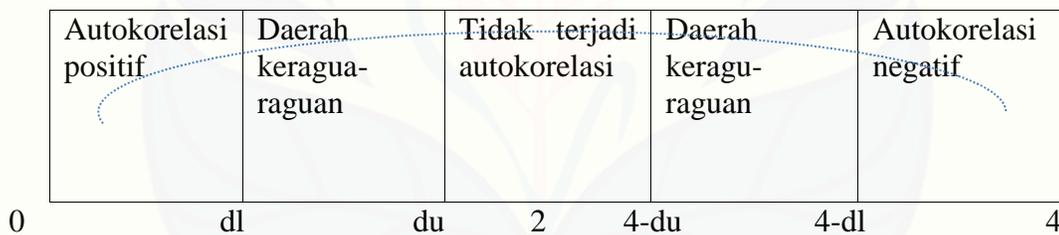
1. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi tinggi.
2. Menambah jumlah observasi.
3. Mentransformasikan data kedalam bentuk lain, misal logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first difference* delta.

B.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidakpastian varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau disebut heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas saat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya. Uji statistik yang dapat digunakan adalah Uji *Gletser*, Uji *Park*, atau Uji *Whiter*. Heteroskedastisitas cenderung terjadi pada model yang menggunakan data *cross section* daripada *time series*. Hal ini dikarenakan data *time series* berfluktuasi dari waktu dengan stabil.

B.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode sebelumnya ($t-1$). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah uji Durbin Watson, uji dengan *run test* dan jika data observasinya diatas 100 data dan sebaliknya menggunakan uji *lagrange multiplier*. Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (*generalized difference equation*). Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson. Uji Durbin Watson digunakan dengan memperhitungkan berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor gnagguan secara berurutan. Daerah pengujian Durbin Watson dapat dilihat dalam tabel:



Gambar 3.1: Daerah Pengujian Autokorelasi

Sumber: Gujarati, 1995.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $d < dl$, berarti terdapat autokorelasi
2. Jika $d > (4-dl)$, berarti terdapat autokorelasi negatif
3. Jika $du < d < (4-dl)$, berarti tidak terdapat autokorelasi
4. Jika $dl < d < du$ atau $(4-du)$, berarti tidak dapat disimpulkan

Hipotesisnya adalah:

H_0 : Tidak terjadi autokorelasi positif

H_0^* : Tidak ada autokorelasi negatif

B.4 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque Berra Test*. Pedoman dari nilai J-B test adalah:

1. Bila nilai J-B hitung $>$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung $<$ nilai probabilitas, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah berdistribusi normal ditolak.
2. Bila nilai J-B hitung $<$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung $>$ nilai probabilitas, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah berdistribusi normal (Wardhono, 2004).

3.2.5 Analisis Path (Analisis Jalur)

Analisis *path* atau jalur pertama kali diperkenalkan oleh seorang biolog bernama Sewal Wright (1921) dan kemudian dikembangkan ke dalam ilmu sosial dan sosiolog oleh O.D Duncan (1960). Menurut Sewal Wright tidak ada hal baru dalam analisis jalur atau lintas karena sama dengan analisis regresi klasik dan dapat digunakan asumsi-asumsi klasik pada variabel terikat dalam analisis jalur atau lintas tersebut.

Analisis jalur merupakan bentuk regresi *linear* terstruktur berkenaan dengan variabel baku dalam suatu sistem tertutup yang secara formal bersifat lengkap. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis jalur merupakan analisis struktural yang membahas hubungan kausal diantara variabel dalam sistem tertutup.

Hubungan antara analisis regresi dan analisis jalur adalah untuk melihat atau menggambarkan dan menguraikan hubungan yang ada disebabkan oleh pengaruh

langsung peubah bebas itu sendiri atau peubah-peubah bebas lainnya. Untuk memudahkan dalam menggambarkan pola hubungan tersebut menunjukkan lintasan atau jalur atau arah peubah satu dengan yang lainnya maka akan dapat dijelaskan melalui diagram.

A. Penentuan Koefisien Lintas

Koefisien lintas atau koefisien jalur pada dasarnya adalah sama dengan koefisien beta (koefisien regresi variabel yang dibakukan). Penentuan koefisien lintas pada model persamaan dalam penelitian ini dapat digunakan dengan rumus, yaitu:

$$i = b_i \frac{Sx_i}{S_Y}$$

Dimana:

β_i = Koefisien regresi parsial tidak baku

b_i = Koefisien regresi sampel

Sx_i = Simpangan baku variabel tidak bebas x

S_Y = Simpangan baku variabel bebas Y

B. Penentuan Koefisien Korelasi Antar Variabel

Koefisien korelasi antar variabel dalam model memiliki tujuan menjelaskan hubungan model kausal dengan jalan membangun gugus simultan dalam variabel bebas. Gugus persamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\begin{cases} C_1 r_{11} + C_2 r_{12} + C_3 r_{13} \dots + C_p r_{1p} = r_{1Y} \\ C_2 r_{21} + C_2 r_{22} + C_3 r_{23} \dots + C_p r_{2p} = r_{2Y} \\ C_1 r_{p1} + C_2 r_{p2} + C_3 r_{p3} \dots + C_p r_{pp} = r_{pY} \end{cases}$$

Dimana: $r_{ij} = r_{xixi} = 1$, serta $r_{ij} = r_{xixj} = r_{ji} = r_{xjxi}$ (i,j = 1,2,...p)

Sistem persamaan simultan tersebut dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & r_{pp} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_p \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} r_{1Y} \\ \vdots \\ r_{pY} \end{pmatrix}$$

(R_x) (C) (R_Y)

Dimana:

R_x = Matrik korelasi antar variabel bebas dalam model regresi berganda yang memiliki p buah variabel bebas, jadi merupakan matriks dengan elemen r_{xjxi} (i,j = 1,2,...p).

C = Vektor koefisien lintas yang menunjukkan pengaruh langsung dari setiap variabel bebas yang telah dibakukan terhadap variabel tidak bebas (nilai koefisien regresi baku)

R_Y = Vektor koefisien korelasi antar variabel bebas X_i dimana i = 1,2, ... p dan variabel tidak bebas Y.

Vektor koefisien lintas juga dapat ditentukan melalui persamaan matriks diatas, sebagai berikut:

$$C = R_x^{-1}R_Y$$

Dimana :

R_x^{-1} = Invers matrik R_x

R_Y = Vektor koefisien korelasi antar variabel bebas X dengan variabel tidak bebas Y.

Dari hasil matriks korelasi dengan persamaan umum dapat pula ditentukan koefisien korelasi linear sederhana sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2) (\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

C. Penentuan Pengaruh Galat atau Error

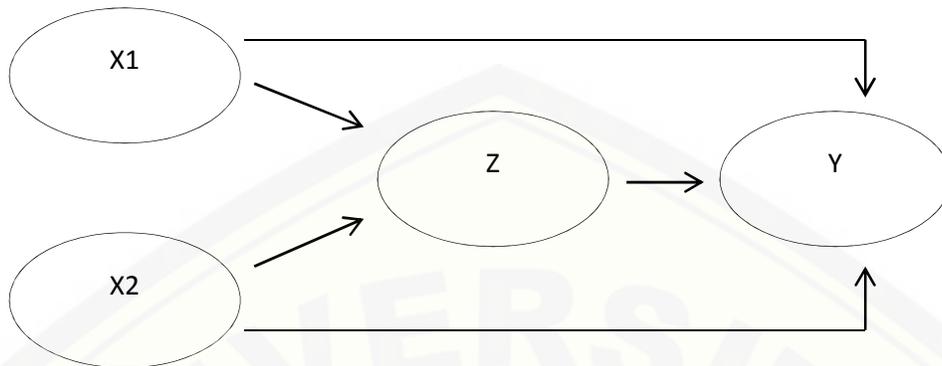
Pengaruh galat atau *error* atau sisaan residual adalah pengaruh yang tidak dapat dijelaskan oleh model analisis lintas. Pengaruh-pengaruh yang tidak dapat dijelaskan oleh suatu model dimasukkan sebagai pengaruh galat atau sisaan residual yang dihitung dengan rumus:

$$C_S^2 = 1 - \sum_{i=1}^p C_i r_{ij} \quad \text{dimana : } C_S = \sqrt{C_S^2}$$

Besaran C_S^2 dalam analisis lintas adalah sama dengan besaran $1-R^2$ dalam analisis regresi linear berganda, dimana keduanya memiliki nilai yang sama besar yang merupakan galat atau error atau sisaan (residual).

D. Diagram Jalur atau Lintas

Analisis lintas atau jalur tidak terlepas dari diagram lintas yang bertujuan membangun diagram lintas untuk memperjelas uraian yang dikemukakan. Dengan mengkombinasikan diagram-diagram geometrik dan persamaan-persamaan aljabar, maka analisis statistika dalam mempelajari hubungan kausal efek diantara variabel menjadi lebih berbobot dalam arti hasilnya lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan hubungan antara variabel secara langsung maupun tidak langsung dapat dijelaskan dengan diagram lintas berikut:



Gambar 3.2: Analisis Jalur Penelitian

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel endogen dalam penelitian dan disimbolkan dengan Y. X1 dan X2 merupakan variabel PDRB (Pe) dan belanja modal (Bm) merupakan variabel eksogen disimbolkan dengan X1 dan X2. Variabel kemiskinan (KMS) merupakan variabel antara yang disimbolkan dengan Z. Sehingga, dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan dua model persamaan:

$$\begin{aligned} \text{Persamaan pertama} & : Z & = f(X1, X2) \\ & : \text{KMS} & = f(\text{Pe}, \text{Bm}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persamaan kedua} & : Y & = f(X1, X2, Z) \\ & : \text{IPM} & = f(\text{Pe}, \text{Bm}, \text{KMS}) \end{aligned}$$

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian. Pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia yaitu: (a) Indeks harapan hidup yang diukur dengan angka harapan lahir, (b) Indeks pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan (c) indeks pendapatan diukur dengan daya beli konsumsi perkapita.
2. Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dapat dilihat melalui penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan eks Karesidenan Besuki.
3. PDRB menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah atau nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.
4. Belanja modal menurut Badan Pusat Statistik adalah belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang digunakan dalam bidang pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset lainnya.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an. Sebuah karesidenan terdiri dari beberapa *afdeeling* (kabupaten). Tidak semua provinsi di Indonesia pernah ada karesidenan. Karesidenan hanya ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Lombok dan Sulawesi. Sebuah karesidenan dipimpin oleh seorang residen. Tahun 1811-1816 pada masa Jawa diambil oleh Inggris dan diangkatnya Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur, pulau Jawa yang terdiri dari seluruh kawasan pesisir Pulau Jawa dibagi menjadi 16 Provinsi dan 17 Karesidenan. Tahun 1854 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan dan memberlakukan *Reglement op het Beleid der Regeiring van Nederlandash-Indie* yaitu Pulau Jawa dibagi atas daerah administratif yang disebut dengan *Gewest* (Karesidenan). Setiap *Gewest* terdiri dari beberapa *afdeling*, *district* dan *onderdistrict*.

Pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuk RIS (Republik Indonesia Serikat) yang terdiri dari tujuh negara bagian, salah satunya adalah negara Jawa Timur. terbentuknya RIS tidak lama, berdasarkan keputusan Presiden no. 109 tahun 1950 negara Jawa Timur dan negara Madura dibubarkan. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, melalui undang-undang No. 2 tahun 1950, tanggal 3 Maret 1950 dan dituangkan dalam undang-undang tanggal 4 Maret 1950 dibentuk Provinsi Jawa Timur. Undang-undang ini diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950. Undang-undang ini mengatakan bahwa cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur tidak berubah, yaitu meliputi tujuh Karesidenan, akan tetapi pemerintahan Karesidenan dihapus dan DPRD Karesidenan dibubarkan. Karesidenan kemudian dikenal dengan istilah pembantu “Gubernur” dan dipakai secara informal. Namun demikian, sebutan “Eks Karesidenan” masih dipakai

secara informal termasuk pada Eks Karesidenan Besuki dan pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berkedudukan di Surabaya.

4.1.1 Keadaan Geografis Wilayah Eks Karesidenan Besuki

Wilayah Eks Karesidenan Besuki merupakan daerah yang berada di wilayah bagian timur provinsi Jawa Timur. Daerah ini meliputi beberapa kabupaten dan kota yang meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo.

A. Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dahulunya merupakan kota administratif, tetapi sejak tahun 2001 istilah kota administratif dihapus sehingga kota administratif Jember kembali menjadi bagian dari kabupaten Jember. Secara geografis kabupaten Jember berada pada posisi 7056'6" sampai 8033'56" lintang selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" bujur timur. Luas kabupaten Jember adalah 3.293,34 Km² dengan ketinggian 0-3.330 mdpl. Iklim kabupaten Jember adalah tropis dengan suhu antara 23⁰-32⁰. Karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.

Kabupaten Jember memiliki sekitar 82 pulau dan pulau yang terbesar adalah pulau Nusa Barong. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jember berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter diatas permukaan laut yaitu sebesar 37,75% selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 m sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai 1000 m dan 7,80% berada pada ketinggian lebih dari 1000 m. Wilayah barat daya kabupaten Jember memiliki dataran dengan ketinggian 0-25 meter dpl. Daerah timur laut yang berbatasan dengan kabupaten Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan kabupaten Banyuwangi memiliki ketinggian diatas 1000 meter dpl.

B. Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi terletak pada koordinat $7,43^0$ - $8,46^0$ lintang selatan dan $113,53^0$ - $114,38^0$ bujur timur. Ibukota dari Kabupaten Banyuwangi adalah Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak paling timur pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah $5.782,50 \text{ km}^2$ dengan kepadatan penduduk 432 juta jiwa/ km^2 yang terdiri dari 24 kecamatan dan 217 kelurahan/desa. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Samudra Hindia
Sebelah Utara	: Kabupaten Situbondo
Sebelah Timur	: Selat Bali
Sebelah Barat	: Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso

C. Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah $1.560,10 \text{ Km}^2$ dengan kepadatan penduduk 471 juta jiwa/ km^2 dan secara geografis berada pada koordinat antara $113^{\circ}48'26''$ BT dan $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ LS. Inukota kabupaten Bondowoso adalah Bondowoso. Letak kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menjadi penghubung antar provinsi. Kabupaten juga tidak memiliki lautan, sehingga sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan dan 219 kelurahan atau desa. Secara wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Kabupaten Jember
Sebelah Utara	: Kabupaten Situbondo
Sebelah Timur	: Kabupaten Banyuwangi
Sebelah Barat	: Kabupaten Probolinggo

D. Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo terletak didaerah pesisir utara pulau Jawa. Kabupaten Situbondo terletak pada koordinat $7^{\circ} 35' - 7^{\circ} 44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 42'$ Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Situbondo adalah Situbondo. Secara administarsi Kabupaten Situbondo memiliki terdiri dari 17 kecamatan dan 136 kelurahan/desa. Diantara keempat kabupaten yang terletak di Eks Karesidenan Besuki, Kabupaten Situbondo memiliki luas yang paling sempit yaitu $1.457,10 \text{ km}^2$ dengan kepadatan penduduk 391 juta jiwa/ km^2 . Secara geografis Kabupaten Situbondo memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
Sebelah Utara	: Selat Madura
Sebelah Timur	: Selat Bali
Sebelah Barat	: Kabupaten Probolinggo

4.1.2 Keadaan Perekonomian Wilayah Eks Karesidenan Besuki

Keadaan perekonomian di kabupaten dan kota pada wialayah Eks Karesidenan Besuki mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan PDRB tersebt tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan PDRB daerahnya melalui setiap kebijakan. Peningkatan PDRB setiap kabupaten dan kota pada daerah Eks Karesidenan Besuki juga dapat dilihat dari sumbangan dari setiap sektor terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) pada setiap wilayah.

A. Kabupaten Jember

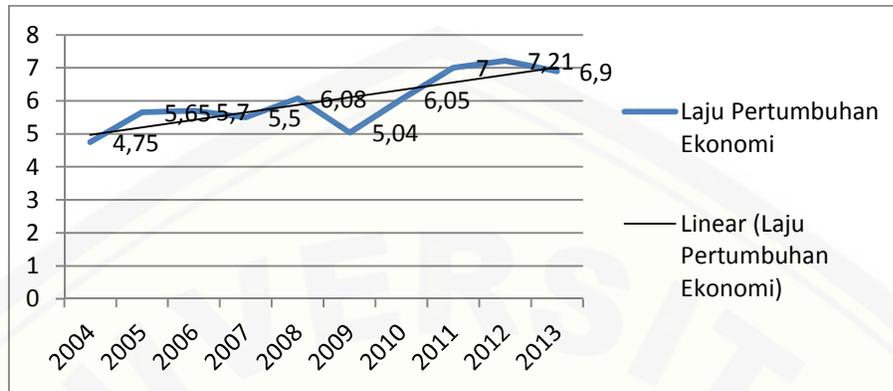
PDRB Kabupaten Jember selama tahun 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah PDRB yang dihasilkan setiap tahunnya yang ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1: PDRB Kabupaten Jember Tahun 2004-2013

No.	Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)
1	2004	7.821.292,24
2	2005	8.236.276,67
3	2006	8.705.996,37
4	2007	9.283.403,37
5	2008	9.039.203,33
6	2009	10.429.382,62
7	2010	11.550.549,44
8	2011	12.359.522,18
9	2012	13.250.929,79
10	2013	14.165.901,52

Lampiran: A (diolah)

PDRB Kabupaten Jember berdasarkan harga konstan 2000 menunjukkan pada setiap tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2013 menghasilkan jumlah PDRB sebesar 14.165.901,52 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2009. Sumbangan terbesar yaitu pada sektor pertanian yang menghasilkan PDRB sebesar 5.205.901,00. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB dikarenakan pada wilayah Kabupaten Jember masih luasnya lahan pertanian. Peningkatan PDRB juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember yang ditunjukkan oleh gambar 4.1 berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.1: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2004-2013

Dari gambar diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember mengalami peningkatan yaitu, terjadi pada tahun 2005 sebesar 0,9 persen; tahun 2006 sebesar 0,09 persen; tahun 2008 sebesar 0,58 persen; tahun 2010 sebesar 1,12 persen; tahun 2011 sebesar 0,5 persen dan tahun 2012 sebesar 0,21 persen. Kabupaten Jember mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar -0,2 persen; tahun 2009 sebesar -0,12 persen dan tahun 2013 sebesar -0,3 persen.

B. Kabupaten Banyuwangi

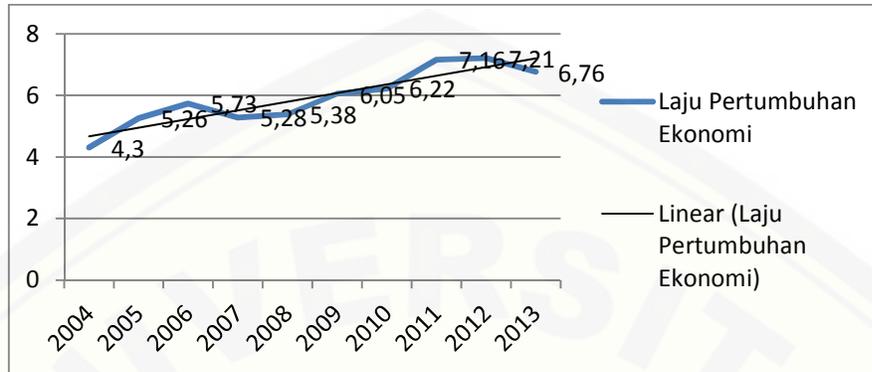
PDRB Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari jumlah PDRB per tahun yang ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2: PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004-2013

No.	Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)
1	2004	8.246.598,38
2	2005	8.629.977,22
3	2006	8.803.446,58
4	2007	9.317.782,48
5	2008	9.863.910,93
6	2009	10.370.280,26
7	2010	11.015.195,17
8	2011	11.804.189,97
9	2012	12.655.586,32
10	2013	13.511.707,90

Lampiran: A (diolah)

PDRB Kabupaten Banyuwangi dilihat dari jumlah PDRB tahun 2004 sampai 2013 berdasarkan harga konstan 2000 mengalami peningkatan setiap tahun. Sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 adalah pada sektor pertanian sebesar 5.993.530,88 dengan sub sektor tanaman bahan pangan yang terbesar yaitu 2.992.352,71. Sumbangan sektor pertanian terbesar disebabkan oleh masih luasnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Banyuwangi. PDRB Kabupaten Banyuwangi juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.2: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004-2013

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan pada tahun 2005 sebesar 2,26 persen; tahun 2006 sebesar 3,1 persen; tahun 2008 sebesar 0,1 persen; tahun 2009 sebesar 1,2 persen; tahun 2010 sebesar 1,7 persen; tahun 2011 sebesar 0,9 persen; tahun 2012 sebesar 1 persen. Penurunan PDRB terjadi pada tahun 2007 sebesar -0,5 persen dan tahun 2013 sebesar 0,5 persen. Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi se Eks Karesidenan Besuki.

C. Kabupaten Bondowoso

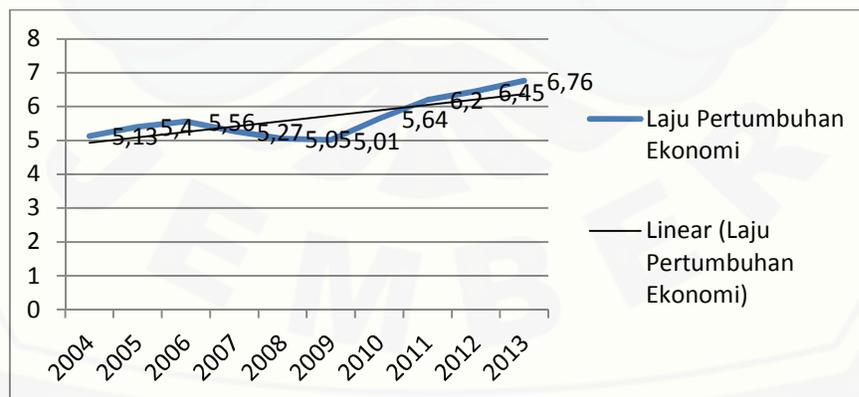
PDRB Kabupaten Bondowoso selama 10 tahun terakhir dimulai tahun 2004-2013 mengalami peningkatan yang cukup baik. PDRB Kabupaten Bondowoso dilihat dari *Product Domestik Regional Bruto* (PDRB) ditunjukkan dengan tabel 4.3 berikut:

Tabel: 4.3: PDRB Kabupaten Bondowoso Tahun 2004-2013

No.	Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)
1	2004	1.699.772,23
2	2005	1.792.354,41
3	2006	2.622.171,38
4	2007	2.777.065,31
5	2008	2.924.690,18
6	2009	2.978.906,80
7	2010	3.146.982,26
8	2011	3.341.964,11
9	2012	3.557.683,76
10	2013	3.780.574,42

Lampiran: A (diolah)

PDRB Kabupaten Bondowoso berdasarkan PDRB harga konstan 2000 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan semua sektor. Sumbangan terbesar adalah apada sektor pertanian sebesar 1.627.483,36 pada tahun 2013. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar untuk PDRB dikareakan pada Kabupatn Bondowoso masih banyak terdapat lahan pertanian dan mayoritas penduduknya merupakan petani. Kabupaten Bondowoso dapat juga dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dalam gambar 4.3 berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.3: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2004-2013

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2005 sebesar 0,3 persen; tahun 2006 sebesar 0,1 persen; tahun 2010 sebesar 0,5 persen; tahun 2011 sebesar 0,6 persen; tahun 2012 sebesar 0,2 persen; tahun 2013 sebesar 0,3 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2007 sebesar -0,3 persen; tahun 2008 sebesar -0,2 persen; tahun 2009 sebesar -0,04 persen.

D. Kabupaten Situbondo

PDRB Kabupaten Situbondo pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB tersebut dapat dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) setiap sektor. PDRB tersebut ditunjukkan dalam tabel 4.4 berikut:

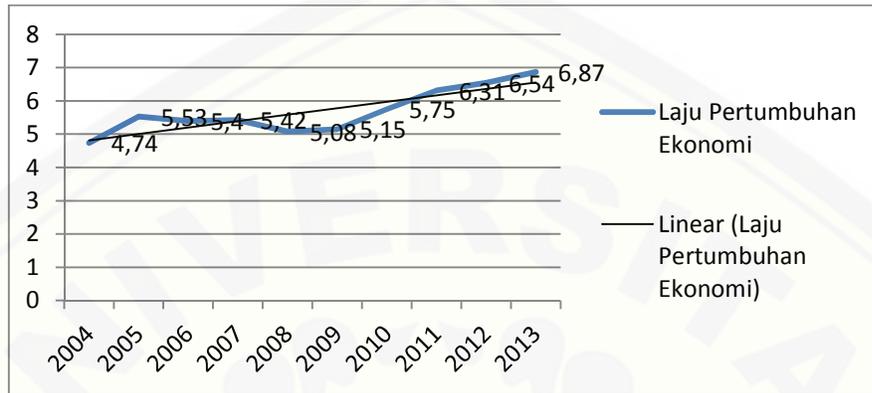
Tabel 4.4: PDRB Kabupaten Situbondo Tahun 2004-2013

No.	Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)
1	2004	2.710.867,19
2	2005	2.856.262,69
3	2006	2.858.609,20
4	2007	3.023.332,13
5	2008	3.715.831,50
6	2009	3.330.419,83
7	2010	3.522.055,33
8	2011	3.744.411,60
9	2012	3.989.292,96
10	2013	4.263.528,37

Lampiran: A (diolah)

PDRB Kabupaten Situbondo berdasarkan harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Sumbangan sektor terbesar pada PDRB Kabupaten Situbondo adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 1.581.902,45 pada tahun 2013. Kabupaten Situbondo yang terletak di kawasan pesisir memiliki banyak pantai sehingga terdapat banyak kawasan wisata, hal tersebut yang menjadikan sumbangan terbesar dari sektor perdagangan, otel dan restoran. Keadaan ekonomi Kabupaten Situbondo juga dapat dilihat dari pertumbuhan

ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo ditunjukkan pada gambar 4.4 berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.4: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo Tahun 2004-2013

Keadaan ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 sebesar 0,8 persen; tahun 2007 sebesar 0,2 persen; tahun 2009 sebesar 0,07 persen; tahun 2010 sebesar 0,6 persen; tahun 2011 sebesar 0,6 persen; tahun 2012 sebesar 0,2 persen; tahun 2013 sebesar 0,3 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2006 sebesar -0,1 persen; tahun 2008 sebesar -0,4 persen.

4.1.3 Keadaan Penduduk Eks Karesidenan Besuki

A. Kabupaten Jember

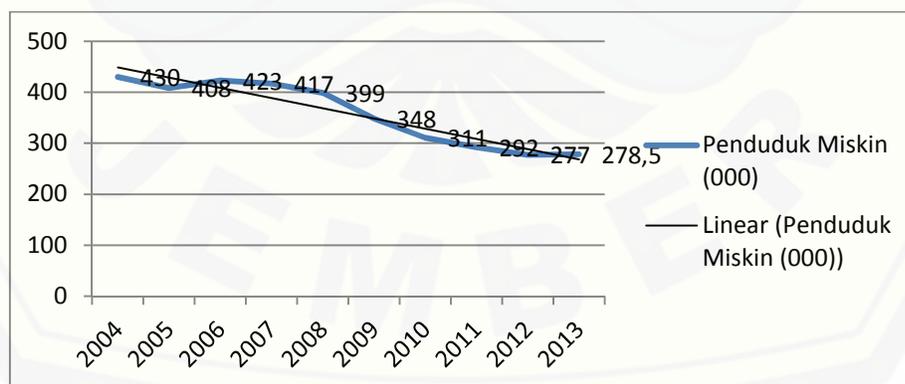
Kabupaten Jember secara administratif terbagi dalam 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan. 959 dusun/lingkungan, 4100 RW dan 13.786 RT. Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk paling banyak dan menempati peringkat pertama diantara ketiga kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Besuki. Jumlah penduduk Kabupaten Jember selama tahun 2004 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5: Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2004-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2004	2.136.999	0,27
2005	2.141.467	0,21
2006	2.146.571	0,24
2007	2.153.883	0,34
2008	2.168.732	0,68
2009	2.179.829	0,51
2010	2.332.726	0,61
2011	2.345.851	0,56
2012	2.355.283	0,40
2013	2.529.967	0,74

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Jumlah penduduk kabupaten Jember pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan . Pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Jember berjumlah 2.136.999 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,27 persen dan pada tahun 2013 jumlah Penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.529.967 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Peningkatan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh tersedianya fasilitas dan sarana yang lengkap seperti sarana pendidikan, kesehatan dan sebagainya.. Keadaan penduduk dilihat dari jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya seperti ditunjukkan dalam gambar 4.5 berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.5: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2004-2013

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember berjumlah 430 juta jiwa dan sampai pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember sebesar 278,5 juta jiwa. Penurunan tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Jember masih bekerja sebagai petani sehingga perekonomian Kabupaten Jember masih ditunjang dari sektor pertanian. Kabupaten jember memiliki banyak perkebunan dan sebagian besar merupakan peninggalan Belanda. Kabupaten Jember terkenal sebagai salah satu daerah yang menghasilkan tembakau terbesar di Jawa Timur maupun di Indonesia. Tembakau yang dihasilkan merupakan tembaku yang digunakan sebagai lapisan luar atau kulit cerutu dan sangat dikenal di Bremen, Jerman dan Belanda.

B. Kabupaten Banyuwangi

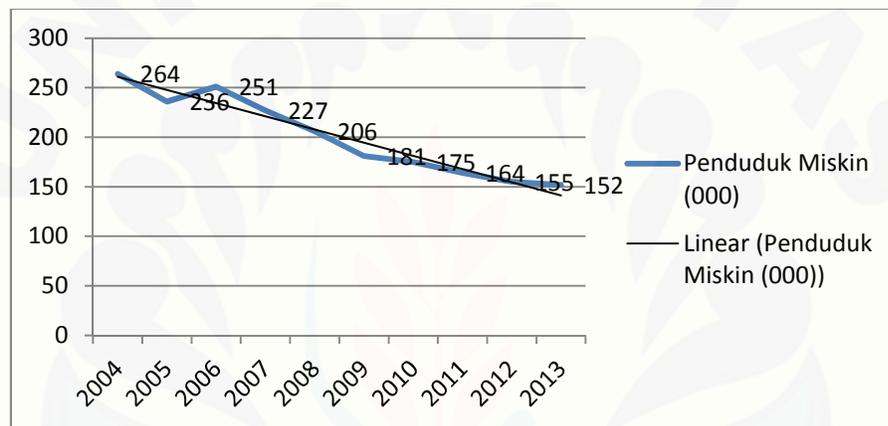
Kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi dalam 24 kecamatan yang dibagi dalam sejumlah desa dan kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2004-2013 dapat dilihat dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6: Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi 2004-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2004	1.557.436	-
2005	1.575.089	0,11
2006	1.576.328	0,07
2007	1.580.441	0,26
2008	1.583.918	0,20
2009	1.550.663	0,29
2010	1.556.078	0,34
2011	1.564.833	0,56
2012	1.568.956	0,26
2013	1.574.778	0,37

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.557.436 dan pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi berjumlah 1.574.778 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37 persen. Keadaan penduduk Kabupaten Banyuwangi dilihat dari jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari gambar 4.6 berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.6: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004-2013

Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 264 juta jiwa. Pada tahun 2004 sampai 2012 jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya beberapa program kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2013 menurut survei badan sosial dan ekonomi Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 152 juta jiwa.

C. Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso secara administratif terbagi dalam 23 kecamatan, 10 kelurahan dan 209 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso adalah terbesar ketiga di Eks Karesidenan Besuki. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Bondowoso sebesar 72.714 jiwa dan yang terendah berada di kecamatan Sempol sebesar 8.103 orang. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2004 sampai 2013 dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut:

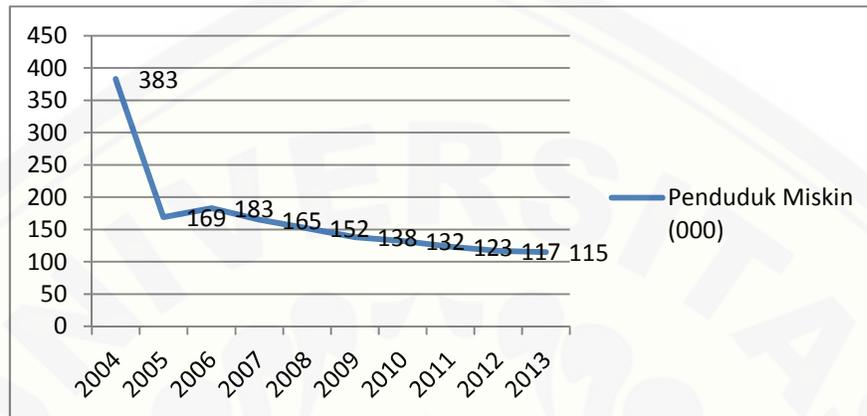
Tabel 4.7: Jumlah Penduduk Kabupaten Bondowoso Tahun 2004-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2004	710.339	-
2005	720.183	0,13
2006	725.571	0,74
2007	727.790	0,30
2008	707.242	0,28
2009	737.807	0,43
2010	736.772	0,14
2011	740.917	0,56
2012	744.067	0,42
2013	755.826	0,15

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso berjumlah 710.339 ribu dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso sebesar 720.183 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 0,13 persen; tahun 2006 jumlah penduduk sebesar 725.571 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 0,74 persen.; tahun 2007 sebesar 727,790 orang dengan laju pertumbuhan 0,30; tahun 2009 sebesar 737.807 dengan laju pertumbuhan 0,43 persen; tahun 2010 sebesar 736.772 dengan laju pertumbuhan 0,14 persen; tahun 2011 sebesar 740.917 dengan laju pertumbuhan 0,56 persen; tahun 2012 sebesar 744.067 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,42 persen; tahun 2013 sebesar 755.826 dengan laju pertumbuhan 0,15 persen. Penurunan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2008 yaitu berjumlah 707.242 dengan laju pertumbuhan 0,28 persen. Keadan penduduk

Kabupaten Banyuwangi juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin seperti digambarkan dalam gambar 4.7 berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.7: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bondowoso Tahun 2004-2013

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bondowoso pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bondowoso sebesar 383,8 juta jiwa; tahun 2005 sebesar 169,5 juta jiwa; tahun 2007 sebesar 165,7 juta jiwa; tahun 2008 sebesar 152,6 ribu orang; tahun 2009 sebesar 138.700 juta jiwa; tahun 2010 sebesar 131,9 juta jiwa; tahun 2011 sebesar 123,9 juta jiwa; tahun 2012 sebesar 117,2 juta jiwa dan tahun 2013 sebesar 115,3 juta jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2006 sebesar 183,6 juta jiwa.

D. Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Eks Karesidenan Besuki yang beribukota di Kecamatan Situbondo. Dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan infrastruktur masyarakat seperti pembangunan dan perbaikan pasar, taman kota, lalu lintas dan lainnya, Pemerintah Kabupaten Situbondo meresmikan

second city of Situbondo yang terletak di Kecamatan Besuki dan Kecamatan Asembagus di wilayah timur.

Secara administratif Kabupaten Situbondo terbagi dalam 17 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 131 desa. Keadaan penduduk di Kabupaten Situbondo dapat dilihat dari jumlah penduduk. Pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut:

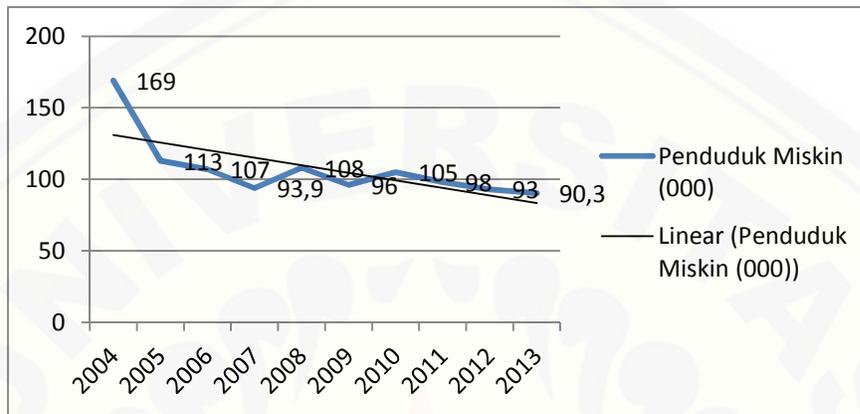
Tabel 4.8: Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2004-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2004	621.624	-
2005	631.382	0,15
2006	636.200	0,76
2007	638.537	0,36
2008	623.042	0,24
2009	643.815	0,33
2010	647.619	0,59
2011	651.263	0,56
2012	654.153	0,44
2013	677.852	0,36

Sumber: BPS, Jawa Timur, 2014

Pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Situbondo berjumlah 621.624 juta jiwa; tahun 2005 berjumlah 631.382 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,15 persen ; tahun 2006 berjumlah 636.200 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,76 persen; tahun 2007 berjumlah 638.537 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,36 persen; tahun 2009 berjumlah 643.815 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,33 persen; tahun 2010 berjumlah 647.619 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,59 persen; tahun 2011 berjumlah 651.263 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,56; tahun 2012 berjumlah 654.153 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,44 persen; tahun 2013 berjumlah 677.852 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 0,36 persen. Penurunan jumlah penduduk terjadi pada tahun 2008 yaitu berjumlah 623.042 dengan laju pertumbuhan 0,36 persen.

Keadaan penduduk juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Situbondo pada tahun 2004 sampai 2013 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin dapat dilihat dari gambar 4.8 berikut:



Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Gambar 4.8: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2004-2013

Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin Kabupaten Situbondo sebesar 169 juta jiwa; tahun 2005 sebesar 113,2 juta jiwa; tahun 2006 sebesar 107,2 juta jiwa; tahun 2007 berjumlah 93,9 juta jiwa; tahun 2009 sebesar 96,8 juta jiwa; tahun 2011 berjumlah 98,6 juta jiwa; tahun 2012 berjumlah 93,5 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada tahun 2008 berjumlah 108,9 juta jiwa; tahun 2010 berjumlah 105,2 juta jiwa; tahun 2013 berjumlah 152,2 juta jiwa.

4.14 Realisasi Belanja Modal di Wilayah Eks Karesidenan Besuki

Belanja modal diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan dengan mempertimbangkan analisa standar belanja, standar harga dan tolak ukurnya sesuai dengan perundang-undangan (UU 32/2004). Wilayah Eks Karesidenan Besuki meliputi 4 kabupaten yaitu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten

Situbondo. Realisasi belanja modal di wilayah Eks Karesidenan Besuki dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9: Realisasi Belanja Modal Wilayah Eks Karesidenan Besuki Tahun 2004-2013

Tahun/ Kabupaten	Kab. Jember	Kab. Banyuwangi	Kab. Situbondo	Kab. Bondowoso
2004	108.606.577	54.692.409	29.731.987	25.319.495
2005	78.442.447	46.258.938	19.252.068	28.614.622
2006	237.704.210	153.437.812	107.252.829	72.728.259
2007	232.444.294	239.535.649	124.143.502	80.968.621
2008	274.510.234	161.726.445	134.471.005	88.554.947
2009	226.759.413	299.667.852	122.887.794	112.005.479
2010	80.974.389	145.857.931	72.033.947	47.599.221
2011	210.061.688	250.847.215	120.719.312	169.878.280
2012	372.743.795	355.812.307	155.800.530	210.599.591
2013	517.153.537	411.268.733	249.807.579	179.134.659

Sumber: BPS Jawa Timur, 2014

Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa belanja modal pada setiap kabupaten cenderung meningkat setiap tahun. Pada Kabupaten Jember realisasi belanja modal terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 517.153.537. Realisasi belanja modal Kabupaten Banyuwangi juga terjadi pada tahun 2013 sebesar 411.268.733. Kabupaten Situbondo 249.807.579 juga terbesar yang terjadi pada tahun 2013. Realisasi belanja modal Kabupaten Bondowoso pada tahun 2013 adalah sebesar 179.134.659 merupakan belanja modal terbesar dari tahun-tahun sebelumnya.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Eks Karesidenan Besuki

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam 3 hal mendasar yaitu: a) Indeks harapan hidup yang diukur dengan angka harapan lahir, b) Indeks pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan c) Indeks pendapatan diukur dengan pendapatan dan daya beli masyarakat. UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan empat klasifikasi

yaitu: low (IPM kurang dari 50), lower medium (IPM antara 50 dan 65.99), upper medium (IPM antara 66 dan 79.99) dan high (IPM 80 ke atas). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Eks Karesidenan Besuki pada tahun 2004 samapai tahun 2013 dapat dilihat dari tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 : Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Eks Karesidenan Besuki Tahun 2004-2013

Kabupaten/ Tahun	Kab. Jember	Kab. Banyuwangi	Kab. Situbondo	Kab. Bondowoso
2004	60,90	65,35	59,94	59,00
2005	61,72	66,02	60,23	59,90
2006	63,04	66,80	61,79	60,36
2007	63,27	67,24	62,64	60,76
2008	63,71	67,80	63,06	61,26
2009	64,33	68,36	63,69	62,11
2010	64,95	68,89	64,26	62,94
2011	65,53	69,58	64,67	63,81
2012	65,99	70,53	65,06	64,98
2013	66,60	71,02	65,73	65,39

Lampiran: A (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui rata-rata pencapaian IPM selama tahun 2004-2013 masing-masing kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Besuki tidak ada yang masuk dalam kategori *low* dan kategori *high*, tetapi keseluruhan rata-rata IPM masing masing kabupaten berada dalam kategori *upper medium*. Kondisi demikian menunjukkan peningkatan yang baik dalm pencapaian IPM di wilayah Eks Karesidenan Besuki tahun 2004-2013.

4.2.2 Model Data Panel

A. Pengujian Model Data Panel

Uji *redudant fixed effect* adalah dimaksudkan untuk menentukan secara tepat model antara *common effect* atau *fixed effect*. Uji hausman test dimaksudkan untuk menentukan secara tepat model yang digunakan dalam penelitian data panel apakah menggunakan *fixed effect* atau *random effect*. Dalam penelitian ini terdapat dua

model pengujian. Model pertama adalah pengaruh kemiskinan terhadap PDRB dan belanja modal. Model kedua yaitu, pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap PDRB, belanja modal dan kemiskinan. Hasil uji hausman pada kedua model penelitian adalah sebagai berikut:

A.1 Model Kemiskinan

Hasil pengujian model pertama yaitu pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan dapat dilihat pada tabel 4.11 dan 4.12 berikut:

Tabel 4.11: Hasil Uji Redudant Fixed Effects

Pool: KEMISKINAN
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	106.756651	(3,34)	0.0000
Cross-section Chi-square	93.747947	3	0.0000

Lampiran: C.1

Hasil Uji Redudant Fixed Effects menunjukkan bahwa pada model keiskinan probabilitas hitung ($0.0000 < (5\%)$), P-value signifikan H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga metode yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4.12: Hasil Uji Hausman Test Model Kemiskinan

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: KEMISKINAN
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.052466	2	0.0000

Lampiran: C.2

Pada uji model kemiskinan diketahui probabilitas hitung ($0.0000 < (5\%)$), P-value signifikan H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga metode yang paling tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

A.2 Model Indeks Pembangunan Manusia

Model kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB, ;belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil uji *Redudant Fixed Effect test* dan uji Hausman model kedua dapat dilihat dalam tabel 4.13 dan 4.14 berikut :

4.13: Hasil Uji Redudant Fixed Effects

Pool: IPM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	24.723463	(3,33)	0.0000
Cross-section Chi-square	47.116497	3	0.0000

Lampiran: D.1

Uji Redudant Fixed Effects pada model IPM menunjukkan probabilitas hitung ($0,0000 < (5\%)$), P-value signifikan H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga metode yang paling tepat adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4.14: Hasil Uji Hausman Test Model IPM

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: IPM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	74.170388	3	0.0000

Lampiran: D.2

Pada uji model kedua diketahui probabilitas hitung $(0,0000) < (5\%)$, P-value signifikan H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga metode yang paling tepat adalah model *Fixed Effect Model* (FEM).

4.2.3. Analisis Regresi Data Panel

Pengujian analisis regresi data panel dilakukan terhadap dua model. Model pertama yaitu, pengaruh kemiskinan terhadap PDRB terhadap dan belanja modal dan model kedua yaitu, pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

A. Model Kemiskinan

Hasil regresi antara variabel *independent* PDRB (PE) terhadap variabel *dependent* kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Besuki dengan menggunakan metode panel data dengan *Fixed effect model* (FEM) dapat dilihat dalam tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15: Hasil Regresi Data Panel Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/20/15 Time: 08:06
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.85933	0.812963	14.58779	0.0000
PE?	-0.951619	0.154564	-6.156788	0.0000
BM?	-0.021075	0.043876	-0.480328	0.6341
Fixed Effects (Cross)				
JEMBER—C	0.536340			
BANYUWANGI—C	0.283225			
SITUBONDO—C	-0.455404			
BONDOWOSO—C	-0.364161			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.943609	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.935316	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.055071	Akaike info criterion	-2.822903
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-2.569571
Log likelihood	62.45805	Hannan-Quinn criter.	-2.731306
F-statistic	113.7857	Durbin-Watson stat	2.347260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran: E.1

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diketahui beberapa persamaan yang dihasilkan sesuai dengan jumlah *cross section* atau jumlah kabupaten yang ada di wilayah Eks Karesidenan Besuki. Persamaan-persamaan tersebut adalah:

- Model persamaan Kms regresi panel untuk kabupaten Jember

$$\text{Kms} = 0,536340 + (-0,951619 (\text{Pe})) + (-0.021075 (\text{Bm}))$$
- Model persamaan Kms regresi panel untuk Kabupaten Banyuwangi

$$\text{Kms} = 0,283225 + (-0,951619 (\text{Pe})) + (-0.021075 (\text{Bm}))$$
- Model persamaan Kms regresi panel untuk kabupaten Bondowoso

$$\text{Kms} = -0,364161 + (-0,951619 (\text{Pe})) + (-0.021075 (\text{Bm}))$$
- Model persamaan Kms regresi panel untuk kabupaten Situbondo

$$\text{Kms} = -0,455404 + (-0,951619 (\text{Pe})) + (-0.021075 (\text{Bm}))$$

Persamaan –persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta Kabupaten Jember sebesar 0,536340 artinya apabila variabel PDRB (Pe) dan belanja modal diasumsikan konstan maka diperkirakan rasio jumlah kemiskinan (Kms) di Kabupaten Jember sebesar 0,536340 orang pertahun.
- Nilai Konstanta Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,283225, artinya apabila variabel PDRB (Pe) dan belanja modal diasumsikan konstan maka diperkirakan rasio jumlah kemiskinan (Kms) di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,283225 orang pertahun.

3. Nilai konstanta Kabupaten Bondowoso sebesar $-0,364161$ artinya apabila variabel PDRB (Pe) dan belanja modal (Bm) diasumsikan konstan maka diperkirakan rasio jumlah kemiskinan (Kms) di Kabupaten Bondowoso sebesar $-0,364161$ orang pertahun.
4. Nilai konstanta Kabupaten Situbondo sebesar $-0,455404$ artinya apabila variabel PDRB (Pe) dan belanja modal (Bm) diasumsikan konstan maka diperkirakan rasio jumlah kemiskinan (Kms) di Kabupaten Situbondo sebesar $0,455404$ orang pertahun.
5. Variabel PDRB (Pe) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar $-0,951619$. hal ini berarti apabila variabel PDRB meningkat sebesar 1 persen pertahun maka akan menurunkan jumlah kemiskinan sebesar $0,951619$ pertahun di wilayah Eks Karesidenan Besuki.
6. Variabel belanja modal (Bm) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar $-0,021075$. hal ini berarti apabila variabel belanja modal meningkat sebesar 1 milyar pertahun maka akan menurunkan jumlah kemiskinan sebesar $0,021075$ pertahun di wilayah Eks Karesidenan Besuki.

B. Model Indeks Pembangunan Manusia

Model kedua yaitu, pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap PDRB (Pe), belanja Modal (Bm) dan Kemiskinan (Kms) di wilayah Eks Karesidenan Besuki dengan menggunakan metode data panel dengan *fixed effect* model (FEM) dapat dilihat dalam tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16: Hasil Regresi Data Panel Model IPM

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/10/15 Time: 11:39
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.61186	27.52572	-1.075789	0.2898
PE?	14.01106	2.824775	4.960061	0.0000
BM?	1.502103	0.553263	2.714990	0.0105
KMS?	-2.429141	2.155223	-1.127095	0.2678
Fixed Effects (Cross)				
JEMBER—C	-3.615959			
BANYUWANGI—C	0.010721			
SITUBONDO—C	1.485381			
BONDOWOSO—C	2.119857			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.955466	Mean dependent var		64.32275
Adjusted R-squared	0.947369	S.D. dependent var		3.016708
S.E. of regression	0.692079	Akaike info criterion		2.259394
Sum squared resid	15.80610	Schwarz criterion		2.554948
Log likelihood	-38.18787	Hannan-Quinn criter.		2.366257
F-statistic	118.0006	Durbin-Watson stat		0.875770
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran: E.2

Berdasarkan hasil analisis pada tabel, terdapat beberapa persamaan yang dihasilkan sesuai dengan jumlah *cross section* atau jumlah kabupaten yang ada di dalam wilayah Eks Karesidenan Besuki. Persamaan-persamaan tersebut adalah:

- a. Model persamaan IPM regresi panel untuk kabupaten Jember

$$IPM = -3,615959 + 0.0000 (Pe) + 0,0105 (Bm) + 0,2678 (Kms)$$

- b. Model persamaan IPM regresi panel untuk Kabupaten Banyuwangi

$$IPM = 0,010721 + 0.0000 (Pe) + 0,0105 (Bm) + 0,2678 (Kms)$$

c. Model persamaan IPM regresi panel untuk kabupaten Bondowoso

$$IPM = 1,485381 + 0.0000 (Pe) + 0,0105 (Bm) + 0,2678 (Kms)$$

d. Model persamaan IPM regresi panel untuk kabupaten Situbondo

$$IPM = 2.119857 + 0.0000 (Pe) + 0,0105 (Bm) + 0,2678 (Kms)$$

Persamaan-persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta Kabupaten Jember sama dengan -3,615959 artinya apabila variabel PDRB (Pe), belanja modal (Bm) dan kemiskinan (Kms) diasumsikan konstan maka diperkirakan rata-rata rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember adalah 3,6 persen.
2. Nilai konstanta Kabupaten Banyuwangi sama dengan 0,010721 artinya apabila variabel PDRB (Pe), belanja modal (Bm) dan kemiskinan (Kms) diasumsikan konstan maka diperkirakan rata-rata rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi adalah 0,01 persen.
3. Nilai konstanta Kabupaten Bondowoso sama dengan 1,485381 artinya apabila variabel PDRB (Pe), belanja modal (Bm) dan kemiskinan (Kms) diasumsikan konstan maka diperkirakan rata-rata rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso adalah 1,4 persen.
4. nilai konstanta Kabupaten Situbondo sama dengan 2.119857 artinya artinya apabila variabel PDRB (Pe), belanja modal (Bm) dan kemiskinan (Kms) diasumsikan konstan maka diperkirakan rata-rata rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo adalah -2,1 persen.
5. Variabel PDRB (Pe) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien regresi sebesar 0.0000. hal ini berarti bahwa apabila variabel PDRB (Pe) meningkat 1 persen pertahun rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetap pertahun di wilayah Eks Karesidenan Besuki dengan asumsi belanja modal (Bm) dan jumlah kemiskinan (Kms) dianggap konstan.

6. Variabel belanja modal (B_m) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien regresi sebesar 0,0105. hal ini berarti bahwa apabila variabel belanja modal meningkat sebesar 1 milyar rupiah pertahun meningkatkan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,01 pertahun di wilayah Eks Karesidenan Besuki dengan asumsi PDRB (P_e) dan jumlah kemiskinan (K_{ms}) konstan.
7. Variabel jumlah kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien regresi sebesar 0,2678. hal ini berarti bahwa apabila variabel jumlah kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1 juta jiwa pertahun akan meningkatkan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,2 pertahun di wilayah Eks Karesidenan Besuki dengan asumsi PDRB (P_e) dan belanja modal (B_m) konstan.

4.2.4 Uji Statistik

Uji statistik dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam hal ini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah kedua model hipotesis yang telah digunakan sesuai dengan kenyataan. Uji statistik terdiri dari uji F, uji t dan uji koefisien determinasi. Hasil pengujian sebagai berikut:

A. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel *independent* yang ada dalam dua model yaitu, model pertama pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan. Pada model pertama variabel *independent* terdiri dari PDRB dan belanja modal berpengaruh secara bersama (simultan) terhadap variabel *dependent* yaitu kemiskinan. Hasil uji F kedua model dapat dilihat dalam tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17: Hasil Uji F Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/10/15 Time: 08:42
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.943609	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.935316	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.055071	Akaike info criterion	-2.822903
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-2.569571
Log likelihood	62.45805	Hannan-Quinn criter.	-2.731306
F-statistic	113.7857	Durbin-Watson stat	2.347260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran: F.1

Berdasarkan hasil analisis pada tabel menunjukkan nilai probabilitas F statistic sebesar 0.000000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ditolaknya hipotesis nol menunjukkan bahwa variabel PDRB (P_e) dan Belanja Modal (B_m) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan (K_{ms}) di wilayah Eks Karesidenan Besuki.

Model kedua adalah pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel *independent* model kedua terdiri dari PDRB, belanja modal dan kemiskinan berpengaruh secara bersama (simultan) terhadap variabel *dependent* yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil uji F kedua model dapat dilihat dalam tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18: Hasil Uji F Model IPM

Dependent Variable: IPM?			
Method: Pooled Least Squares			
Date: 08/10/15 Time: 11:39			
Sample: 2004 2013			
Included observations: 10			
Cross-sections included: 4			
Total pool (balanced) observations: 40			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.955466	Mean dependent var	64.32275
Adjusted R-squared	0.947369	S.D. dependent var	3.016708
S.E. of regression	0.692079	Akaike info criterion	2.259394
Sum squared resid	15.80610	Schwarz criterion	2.554948
Log likelihood	-38.18787	Hannan-Quinn criter.	2.366257
F-statistic	118.0006	Durbin-Watson stat	0.875770
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran: F.2

Berdasarkan hasil analisis tabel, model kedua menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.00000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Penolakan terhadap hipotesis nol menunjukkan bahwa variabel PDRB (Pe), Belanja modal (Bm) dan Kemiskinan (Kms) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Eks Karesidenan Besuki.

B. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel *independent* terhadap variabel *dependent* pada kedua model. Kedua model yang dimaksud adalah model pertama yaitu pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan dan model kedua yaitu pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B.1 Model Kemiskinan

Model pertama yaitu pengaruh kemiskinan terhadap PDRB dan belanja modal, dimana kemiskinan sebagai variabel *dependent* dan PDRB serta belanja modal sebagai variabel *independent*. Hasil dari perhitungan uji t terhadap kedua model pertama dapat dilihat dalam tabel 4.19 berikut:

Tabel 4.19: Hasil Uji t Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/10/15 Time: 08:42
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.85933	0.812963	14.58779	0.0000
PE?	-0.951619	0.154564	-6.156788	0.0000
BM?	-0.021075	0.043876	-0.480328	0.6341

Lampiran: G.1

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh masing-masing variabel *independent* sebagai berikut:

1. Nilai probabilitas t_{hitung} variabel PDRB (Pe) sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak, berarti secara parsial PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Eks Karesidenan Besuki.
2. Nilai Probabilitas t_{hitung} variabel Belanja modal (Bm) sebesar 0.6341 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka H_0 diterima, berarti secara parsial belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Eks Karesidenan Besuki pada tingkat signifikansi 5 persen.

B.2 Model Indeks Pembangunan Manusia

Model kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana PDRB dan belanja modal adalah variabel *independet* sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel *dependent*. Hasil uji t model kedua dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20: Hasil Uji t Model IPM

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/15/15 Time: 07:28
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.61186	27.52572	-1.075789	0.2898
PE?	14.01106	2.824775	4.960061	0.0000
BM?	1.502103	0.553263	2.714990	0.0105
KMS?	-2.429141	2.155223	-1.127095	0.2678

Lampiran: G.2

Berdasarkan tabel dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel *independent* pada model kedua sebagai berikut:

1. Nilai probabilitas t_{hitung} variabel PDRB sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak. Berarti secara parsial variabel PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Besuki.
2. Nilai probabilitas t_{hitung} variabel Belanja Modal sebesar 0.0105 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak. Berarti secara parsial variabel Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap IPM di wilayah Eks Karesidenan Besuki.

3. Nilai probabilitas t -hitung variabel Kemiskinan sebesar 0.2678 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka H_0 diterima. Berarti secara parsial variabel kemiskinan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPM di wilayah Eks Karesidenan Besuki pada tingkat signifikansi 5 persen.

C. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi berganda dimaksudkan untuk mengetahui besarnya sumbangan dari variabel bebas (*independent variables*) terhadap variabel terikat (*dependent variables*). Nilai koefisien determinan terletak antara 0 dan 1, apabila R^2 atau *R-square* mendekati 1 maka garis model tersebut memiliki sumbangan yang besar terhadap variabel terikat. Apabila R^2 atau *R-square* mendekati 0 maka model tersebut tidak mempunyai pengaruh yang besar atau tidak bias memberikan sumbangan terhadap perubahan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan dua model penelitian sehingga pengujian terhadap R^2 akan dilakukan terhadap kedua model tersebut.

C.1 Model Kemiskinan

Model pertama dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan. Hasil dari uji R^2 pada model pertama dapat dilihat dalam tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21: Hasil Uji R^2 Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?			
Method: Pooled Least Squares			
Date: 08/10/15 Time: 08:42			
Sample: 2004 2013			
Included observations: 10			
Cross-sections included: 4			
Total pool (balanced) observations: 40			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.943609	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.935316	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.055071	Akaike info criterion	-2.822903
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-2.569571
Log likelihood	62.45805	Hannan-Quinn criter.	-2.731306
F-statistic	113.7857	Durbin-Watson stat	2.347260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran: H.1

Berdasarkan analisis regresi pada tabel diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0.943609, hal ini berarti 94,36% perubahan jumlah kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Besuki dipengaruhi oleh PDRB dan belanja modal. Sedangkan 5,64% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat.

C.2 Model Indeks Pembangunan Manusia

Model kedua dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil uji R^2 dalam model kedua dapat dilihat dalam tabel 4.22 berikut:

Tabel 4.22: Hasil Uji R² Model IPM

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/15/15 Time: 07:28
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.955466	Mean dependent var	64.32275
Adjusted R-squared	0.947369	S.D. dependent var	3.016708
S.E. of regression	0.692079	Akaike info criterion	2.259394
Sum squared resid	15.80610	Schwarz criterion	2.554948
Log likelihood	-38.18787	Hannan-Quinn criter.	2.366257
F-statistic	118.0006	Durbin-Watson stat	0.875770
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran: H.2

Berdasarkan hasil pada model kedua dalam tabel tersebut diperoleh hasil koefisien determinasi berganda adalah 0.955466, hal ini berarti 95,54% perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Eks Karesidenan Besuki dipengaruhi oleh PDRB, belanja modal dan kemiskinan, sedangkan 4,46% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang telah dibuat.

4.2.5 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan pengujian asumsi klasik dengan estimasi regresi yang harus memenuhi syarat asumsi klasik yaitu BLUE (*Best, Linear, Unbiased, Estimator*) maka diperlukan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. Dalam penelitian ini pengujian asumsi klasik digunakan dalam kedua model penelitian. Pengujian kedua model sebagai berikut:

A. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan multikolinieritas atas variabel dependennya atau tidak dengan membandingkan R^2 model dengan r^2 pada model auxiliary setiap variabel *independentnya*. Apabila nilai r^2 auxiliary lebih kecil daripada R^2 model maka dapat dikatakan variabel tersebut tidak memiliki masalah multikolinieritas. Pada penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan terhadap kedua model.

A.1 Model Kemiskinan

Model pertama dalam penelitian ini yaitu pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan. Hasil uji multikolinieritas pada model pertama dapat dilihat dalam tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23: Hasil Uji Multikolinieritas Model Kemiskinan

No.	Variabel Dependent	r^2 auxiliary model	R^2 Model	Keterangan
1.	Pe	0.661591	0,943069	Tidak terjadi multikolinieritas
2.	Bm	0.661591	0,943069	Tidak terjadi multikolinieritas

Lampiran: I.1

Berdasarkan tabel diketahui bahwa di dalam model empiris pada analisis jumlah kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Besuki tidak terdapat masalah multikolinieritas karena nilai r^2 auxiliary model pada setiap variabel yaitu, PDRB dan belanja modal sebesar 0.661591 lebih kecil dari R^2 Model yaitu sebesar 0.943069.

A.2 Model Indeks Pembangunan Manusia

Model kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24: Uji Multikolineritas Model IPM

No.	Variabel Dependent	r^2 model <i>auxiliary</i>	R^2 model	Keterangan
1.	Pe	0.661591	0.955466	Tidak terjadi multikolineritas
2.	Bm	0,537549	0.955466	Tidak terjadi multikolineritas
3.	Kms	0,092159	0.955466	Tidak terjadi multikolineritas

Lampiran: I.2

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dalam model kedua dalam model empiris pada analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Eks Karesidenan Besuki tidak terdapat masalah multikolineritas karena nilai r^2 *auxiliary* pada setiap variabel yaitu PDRB (Pe) sebesar 0.661591, Belanja Modal (BM) sebesar 0,537549 dan Kemiskinan (Kms) sebesar 0,092159 tidak lebih besar dari R^2 model yaitu sebesar 0.955466.

B. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan *cross section weights* dengan membandingkan nilai *sum squared resid*.

B.1 Model Kemiskinan

Model pertama dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel 4.25 berikut:

Tabel 4.25: Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 08/10/15 Time: 10:55
 Sample: 2004 2013
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 40
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Weighted Statistics			
R-squared	0.972531	Mean dependent var	8.037189
Adjusted R-squared	0.968492	S.D. dependent var	4.184791
S.E. of regression	0.054307	Sum squared resid	0.100275
F-statistic	240.7536	Durbin-Watson stat	1.691962
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.943089	Mean dependent var	5.266378
Sum squared resid	0.104067	Durbin-Watson stat	2.306838

Lampiran: J.1

Berdasarkan tabel diketahui bahwa di dalam model empiris pada kasus jumlah kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Besuki tidak terdapat masalah heteroskedastisitas karena nilai sum squared resid pada unweighted statistic > sum squared resid pada weighted statistic yaitu sebesar $0,100275 < 0,104067$.

B.2 Model Indeks Pembangunan Manusia

Model kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinn terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel 4.26 berikut:

Tabel 4.26: Hasil Uji Heteroskedastisitas Model IPM

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 08/15/15 Time: 07:53
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.982492	Mean dependent var	89.61603
Adjusted R-squared	0.979308	S.D. dependent var	42.95209
S.E. of regression	0.641069	Sum squared resid	13.56201
F-statistic	308.6384	Durbin-Watson stat	1.109223
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.951967	Mean dependent var	64.32275
Sum squared resid	17.04777	Durbin-Watson stat	0.881240

Lampiran: J.2

Berdasarkan tabel diketahui bahwa di dalam model empiris pada kasus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Eks Karesidenan Besuki terdapat masalah heteroskedastisitas karena nilai sum squared resid pada *unweighted statistic* > *sum squared resid statistic* yaitu sebesar $13.56201 > 17.04777$.

C. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian suatu model apakah antara variabel pengganggu bagi masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi atau tidak. Uji autokorelasi pada penelitian ini digunakan terhadap kedua model.

C.1 Model Kemiskinan

Model pertama dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan. Hasil uji autokorelasi model pertama dapat dilihat dalam tabel 4.27 berikut:

Tabel 4.27: Uji Autokorelasi Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?			
Method: Panel Least Squares			
Date: 08/10/15 Time: 10:59			
Sample: 2004 2013			
Periods included: 10			
Cross-sections included: 4			
Total panel (balanced) observations: 40			
<hr/>			
Cross-section fixed (dummy variables)			
<hr/>			
R-squared	0.943609	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.935316	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.055071	Akaike info criterion	-2.822903
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-2.569571
Log likelihood	62.45805	Hannan-Quinn criter.	-2.731306
F-statistic	113.7857	Durbin-Watson stat	2.347260
Prob(F-statistic)	0.000000		
<hr/>			

Lampiran: K.1 (diolah)

Dari tabel diperoleh nilai DW sebesar 2.347260 (terletak dibawah DW 1,1426 dan diatas 2,2614) yang menunjukkan bahwa model empiris pada kasus analisa jumlah kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Besuki mengalami masalah autokorelasi.

C.2 Model Indeks Pembangunan Manusia

Model Kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel *dependent* adalah IPM sedangkan variabel *independent* adalah PDRB, belanja modal dan

kemiskinan. Hasil uji autokorelasi model kedua dapat dilihat dalam tabel 4.28 berikut:

Tabel 4.28: Uji Autokorelasi Model IPM

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 08/15/15 Time: 07:57
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.955466	Mean dependent var	64.32275
Adjusted R-squared	0.947369	S.D. dependent var	3.016708
S.E. of regression	0.692079	Akaike info criterion	2.259394
Sum squared resid	15.80610	Schwarz criterion	2.554948
Log likelihood	-38.18787	Hannan-Quinn criter.	2.366257
F-statistic	118.0006	Durbin-Watson stat	0.875770
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran: K.2

Berdasarkan tabel diperoleh nilai DW sebesar 0.875770 (terletak di bawah 1,2848 dan dibawah batas atas 2,271) yang menunjukkan bahwa model empiris pada kasus analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Eks Karesidenan Besuki mengalami masalah autokorelasi.

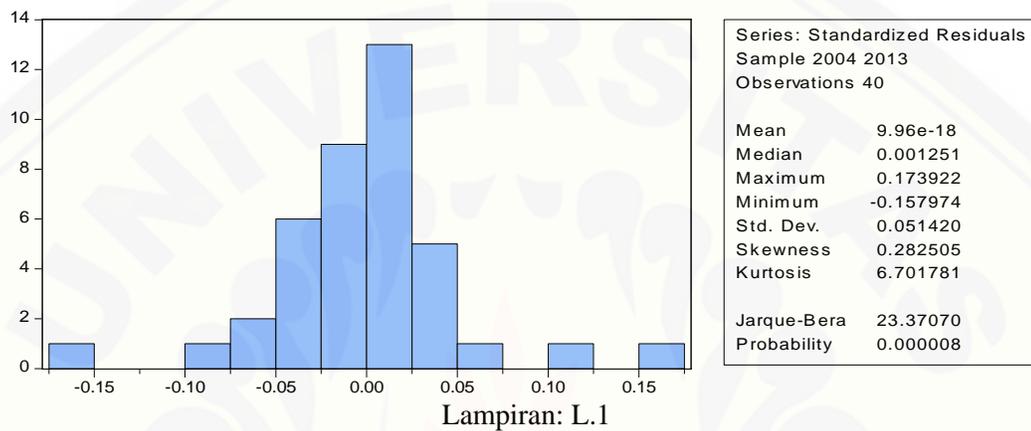
D. Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan melalui uji *Jarque Berra* dengan perhitungan skewness dan kurtosis. Diagnosa menggunakan perbandingan *Jarque Berra* X^2 dimana jika *Jarque Berra* $< X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi normal, dan apabila nilai probabilitas jaque berra $>$ (5%) maka residualnya berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan terhadap kedua model penelitian.

D.1 Model Kemiskinan

Model pertama penelitian ini yaitu pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap kemiskinan. Hasil uji normalitas model pertama dapat dilihat dalam tabel 4.29 berikut:

Tabel 4.29: Uji Normalitas Model Kemiskinan

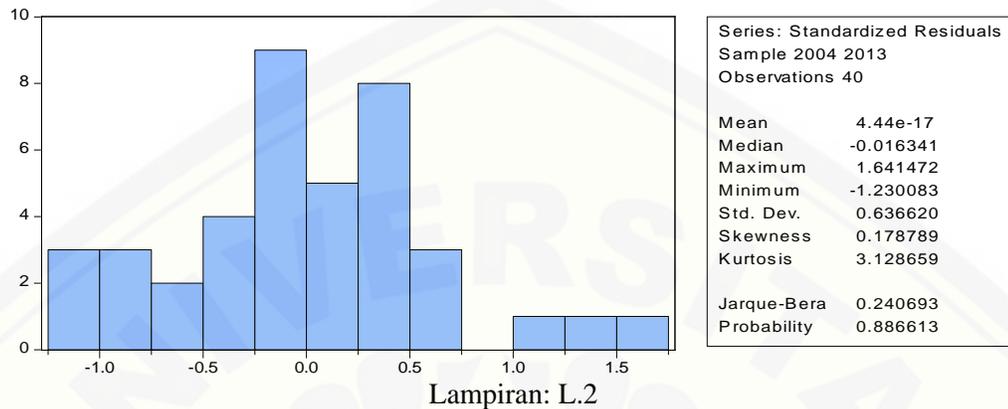


Dari gambar diketahui nilai *Jarque Berra* sebesar 23,37070, dan nilai probabilitas X^2 hitung sebesar 0.0000008 lebih kecil dari (5%). Hal ini menunjukkan bahwa model empiris tidak terdistribusi normal.

D.2 Model Indeks Pembangunan Manusia

Model kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil uji normalitas terhadap model kedua dapat dilihat dalam tabel 4.30 berikut:

Tabel 4.30: Uji Normalitas Model IPM



Dari gambar diketahui bahwa nilai *Jarque Berra* sebesar 0,240693 dan nilai probabilitas X^2 hitung sebesar 0.886613 lebih besar dari (5%). Hal ini menunjukkan bahwa model empiris telah berdistribusi normal.

Dalam hasil pengujian asumsi klasik dalam data panel diatas terdapat masalah pengujian, seperti masalah heteroskedastisitas, autokorelasi dan data tidak terdistribusi normal. Masalah uji asumsi klasik dalam data panel yang terjadi tidak dipermasalahkan karena disebabkan oleh data panel merupakan data gabungan dari *time series* dan *cross section* sehingga data panel merupakan satu cara dari penyembuhan permasalahan uji asumsi klasik. Menurut Wibisono dalam aji (Mirza:2012) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gujarati dan Verbeek menyebutkan beberapa keunggulan dalam data panel salah satunya adalah data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin timbul oleh agregasi data individu, data panel mampu mengontrol *heterogenitas* individu sehingga dapat digunakan untuk menguji dan membangun model kompleks. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut dapat menjadi dasar bahwa permasalahan pengujian asumsi klasik yang terjadi pada data panel sudah dapat teratasi.

4.2.3 Analisis Lintas (Path Analysis)

Analisis lintas atau analisis jalur merupakan analisis regresi yang bersifat lengkap. Dalam analisis jalur dapat menentukan sebab dan akibat dari pengaruh setiap variabel independent terhadap variabel *dependent* dalam penelitian. Dalam penelitian ini analisis lintas atau analisis jalur akan digunakan dalam menguji kedua model penelitian.

A. Model Kemiskinan

Model pertama dalam penelitian ini yaitu, pengaruh PDRB, belanja modal terhadap keimiskinan dan model kedua adalah pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia.

A.1 Penentuan Koefisien Lintas

Hasil analisis data dan regresi panel diperoleh beberapa informasi diantaranya rata-rata, simpangan baku, ragam dan sebagainya yang akan digunakan dalam menghitung koefisien lintas atau jalur ditunjukkan dalam tabel 4.31 dan 4.32 sebagai berikut:

Tabel 4.31: Analisis Regresi Model Penuh $Y = f(X_1, X_2)$

No.	Variabel Bebas	Rata-Rata	Simpangan Baku	Ragam
1	X_1	6,748697395	0,530833384	0,281784082
2	X_2	18,0029357	0,588764524	0,346643665
	Variabel Terikat (Y)	24,7516331	1,11959836	0,465331156

Lampiran: B

Tabel 4.32: Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t-stat. (DB=10)
X_1	-0,951619	0,154564	-6,156788
X_2	-0,021075	0,043876	0,480328
Konstanta	-0,972694		

Lampiran: E.1

Hasil analisis tabel dapat ditentukan model regresi model kemiskinan sebagai berikut:

$$Y = 11,85933 - 0,951619 X_1 + -0,021075 X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat ditentukan koefisien lintas dari setiap variabel dengan rumus:

$$b_i = b_i \frac{Sx_i}{S_Y}$$

Dimana:

- β_i = Koefisien regresi parsial tidak baku
- b_i = Koefisien regresi sampel
- Sx_i = Simpangan baku variabel tidak bebas x
- S_Y = Simpangan baku variabel bebas Y

$$C_1 = b_i \frac{Sx_1}{S_Y} = (-0,951) (0,5308/0,4653) = -1,085$$

$$C_2 = b_2 \frac{Sx_2}{S_Y} = (-0,021) (0,5887/0,4653) = -0,026$$

Dari perhitungan tersebut, diketahui bahwa koefisien lintas variabel PDRB (C_1) adalah sebesar -1,085 dan koefisien lintas variabel belanja modal (C_2) adalah sebesar -0,026.

A.2 Penentuan Koefisien Korelasi Antar Variabel

Penentuan koefisien korelasi antar variabel dapat ditentukan melalui membangun gugus persamaan simultan antar variabel dalam model. Gugus persamaan simultan model kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$\begin{cases} C_1 r_{11} + C_2 r_{12} = r_{1Y} \\ C_1 r_{21} + C_2 r_{22} = r_{2Y} \end{cases}$$

Dengan menggunakan persamaan umum koefisien korelasi sederhana dengan rumus:

$$r_{XY} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2) (\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Dari perhitungan korelasi dapat diperoleh hasil seperti berikut yang dapat disusun dalam sebuah tabel persamaan gugus simultan sebagai berikut:

$$\begin{cases} 1,0000C_1 + 0,6616 = 0,5375 \\ 0,6616C_1 + 1,0000C_2 = 0,0921 \end{cases}$$

Dari persamaan gugus simultan tersebut, dapat disusun dalam bentuk matrik sebagai berikut:

$$\begin{Bmatrix} 1,0000 & 0,6616 \\ 0,6616 & 1,0000 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,5375 \\ 0,0921 \end{Bmatrix}$$

Berdasarkan koefisien lintas dan tabel matrik dapat ditentukan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y, sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Z_1 (X_1 dibakukan) terhadap variabel respons Y
 - 1.A Pengaruh langsung Z_1 terhadap Y = $C_1 = -1,085$
 - 1.B Pengaruh Total = $r_{1Y} = r_{x_1Y} = r_{z_1Y} = 0,5375$
2. Pengaruh Variabel Z_2 (X_2 dibakukan) terhadap variabel respons Y
 - 2.A Pengaruh langsung Z_2 terhadap Y = $C_2 = -0,026$
 - 2.B Pengaruh Total = $r_{2Y} = r_{x_2Y} = r_{z_2Y} = 0,0921$

Berdasarkan analisis lintas terlihat bahwa variabel bebas PDRB (X_1) dan belanja modal memiliki pengaruh langsung terhadap variabel respon kemiskinan (Y). Pengaruh langsung variabel PDRB memiliki pengaruh paling besar yaitu sebesar -1,085 dengan elastisitas negatif yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan satu simpangan baku dalam nilai X_1 secara rata-rata akan menurunkan nilai Y sebesar -1,085.

A.3 Penentuan Pengaruh Galat Atau Sisa Residual

Pengaruh galat atau *error* atau sisaan *residual* adalah pengaruh yang tidak dapat dijelaskan oleh model analisis lintas. Pengaruh sisa residu pada model kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} C_S^2 &= 1 - \sum_{i=1}^p C_i r_{ij} \\ &= 1 - \{(-1,0855)(0,5375) + (-0,0266)(0,0921)\} \\ &= 0,413 \\ C_S &= \sqrt{C_S^2} = \sqrt{0,413} = 0,6426 \end{aligned}$$

Besaran $C_S^2 = 0,413$ dapat diinterpretasikan bahwa analisis lintas tidak dapat menjelaskan keragaman total variabel Y sebesar 0,413 atau 41,3%. Dengan demikian analisis lintas berhasil menjelaskan keragaman total dari Y adalah sebesar $1 - 0,413 = 0,587$ atau 58,7%. Hasil tersebut berbeda dengan hasil koefisien determinasi pada analisis regresi data panel dikarenakan pada hasil analisis regresi masih mengalami bias sehingga secara nyata koefisien determinasi adalah 0,587 atau 58,7%.

B. Model Indeks Pembangunan Manusia

Model kedua dalam penelitian ini adalah pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel dependen dalam model kedua adalah Indeks Pembangunan Manusia (X_4) sedangkan variabel independen adalah PDRB (X_1), belanja modal (X_2) dan kemiskinan (Z).

B.1 Penentuan koefisien jalur

Hasil analisis data dan regresi panel diperoleh beberapa informasi diantaranya rata-rata, simpangan baku, ragam dan sebagainya yang akan digunakan dalam menghitung koefisien lintas atau jalur pada model Indeks Pembangunan Manusia ditunjukkan dalam tabel 4.33 dan 4.34 sebagai berikut:

Tabel 4.33: Analisis Regresi Model Penuh $Y = f(X_1, X_2, Z)$

No.	Variabel Bebas	Rata-Rata	Standar Deviasi
1.	X_1	6,748	0,5308
2.	X_2	18,002	0,5887
3.	Z	5,2663	0,4653
Variabel terikat (Y)		50,723	1,7368

Lampiran: B

Tabel 4.34: Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien Regresi	Standar error	t-stat. (DB = 10)
X_1	14,01106	2.824775	4,690061
X_2	1,502103	0,553263	2,714990
Z	-2,429141	2,155223	-1,127095
Konstanta		-29,61186	

Lampiran: E.2

Dari analisis tabel dapat dibangun persamaan regresi linear berganda sebagai pendugaan model IPM sebagai berikut:

$$Y = -29,61186 + 14,01106 X_1 + 1,502103 X_2 - 2,429141 Z$$

Dari persamaan tersebut dapat ditentukan koefisien lintas dari setiap variabel dengan rumus:

$$i = b_i \frac{Sx_i}{S_Y}$$

Dimana:

β_i = Koefisien regresi parsial tidak baku

b_i = Koefisien beta

Sx_i = Simpangan baku variabel tidak bebas x

S_Y = Simpangan baku variabel bebas Y

$$C_1 = b_i \frac{Sx_1}{S_Y} = (14,01106) (0,5308/1,736) = 4,282$$

$$C_2 = b_i \frac{Sx_2}{S_Y} = (1,502103) (0,5887/1,736) = 0,509$$

$$C_3 = b_i \frac{Sx_3}{S_Y} = (-2,429141) (0,4653/1,736) = -0,6508$$

Berdasarkan analisis koefisien diatas diketahui bahwa koefisien PDRB (C_1) adalah sebesar 4,282, belanja modal (C_2) sebesar 0,509 dan kemiskinan (C_3) sebesar -0,6508.

B.2 Penentuan Koefisien Korelasi Antar Variabel

Penentuan koefisien korelasi antar variabel dapat ditentukan melalui membangun gugus persamaan simultan antar variabel dalam model . Gugus persamaan simultan model Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$\begin{cases} C_1 r_{11} + C_2 r_{12} + C_3 r_{13} = r_{1Y} \\ C_1 r_{21} + C_2 r_{22} + C_3 r_{23} = r_{2Y} \\ C_1 r_{31} + C_2 r_{32} + C_3 r_{33} = r_{3Y} \end{cases}$$

Dengan menggunakan persamaan umum koefisien korelasi sederhana dengan rumus:

$$r_{XY} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2) (\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Dari perhitungan korelasi dapat diperoleh hasil seperti berikut yang dapat disusun dalm sebuah tabel persamaan gugus simultan sebagai berikut:

$$\begin{cases} 1,0000 C_1 + 0,6616 C_2 + 0,5375 C_3 = 0,7485 \\ 0,6616 C_1 + 1,0000 C_2 + 0,0921 C_3 = 0,698 \\ 0,5375 C_1 + 0,0921 C_2 + 1,0000 C_3 = -0,0536 \end{cases}$$

Sistem persamaan tersebut dapat disusun dalam sebuah tabel matriks sebagai berikut:

$$\begin{pmatrix} 1,0000 + 0,6616 + 0,5375 \\ 0,6616 + 1,0000 + 0,0921 \\ 0,5375 + 0,0921 + 1,0000 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,7485 \\ 0,6988 \\ -0,0536 \end{pmatrix}$$

Berdasarkan koefisien lintas dan tabel matrik dapat ditentukan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y, sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Z_1 (X_1 dibakukan) terhadap variabel respons Y
 - 1.A Pengaruh langsung Z_1 terhadap Y = $C_1 = 4,282$
 - 1.B Pengaruh tidak langsung melalui $Z_3 = C_3 r_{12} = (-0,6508)(0,6616) = -0,4305$
 - 1.C Pengaruh total = 0,748
2. Pengaruh Variabel Z_2 (X_2 dibakukan) terhadap variabel respons Y
 - 2.A Pengaruh langsung Z_2 terhadap Y = $C_2 = 0,509$
 - 2.B Pengaruh tidak langsung melalui $Z_3 = C_3 r_{23} = (-0,6508)(0,0921) = -0,059$
 - 2.C Pengaruh total = 0,698
3. Pengaruh Variabel Z_3 (Z dibakukan) terhadap variabel respons Y
 - 3.A Pengaruh langsung Z_3 terhadap Y = $C_3 = -0,6508$
 - 3.B Pengaruh total = -0,0536

Berdasarkan perhitungan diatas pengaruh langsung variabel PDRB terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 4,282 dan pengaruh tidak langsung melalui variabel kemiskinan adalah sebesar -0,430 serta pengaruh total variabel PDRB sebesar 0,748. Pengaruh variabel belanja modal terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 0,509 dan pengaruh tidak langsung melalui variabel kemiskinan adalah sebesar -0,059 serta pengaruh total adalah 0,698. Pengaruh langsung variabel kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar -0,6508.

B.3 Penentuan Pengaruh Sisa Terhadap Variabel Respons Y

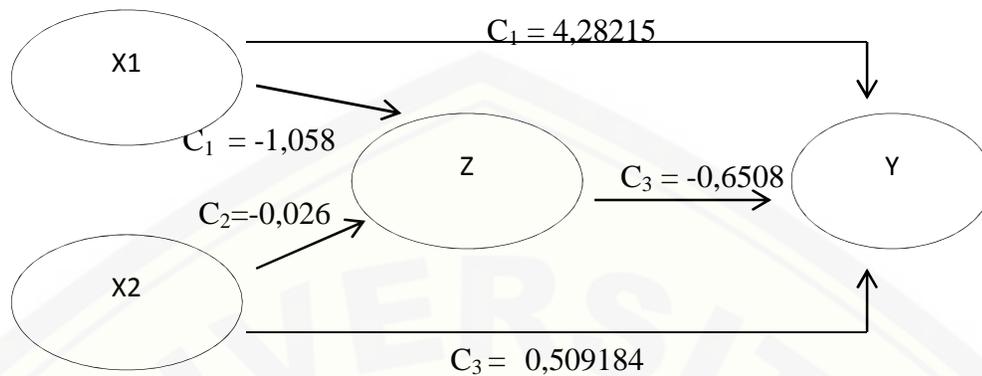
Pengaruh galat atau error atau sisaan residual adalah pengaruh yang tidak dapat dijelaskan oleh model analisis lintas. Pengaruh sisa residu pada model Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}C_S^2 &= 1 - \sum_{i=1}^p C_i r_{ij} \\ &= 1 - (4,28215)(0,748568) + (0,501984)(0,698863) + (-0,650801)(-0,053) \\ &= 0,289 \\ C_S &= \sqrt{C_S^2} = \sqrt{0,413} = 0,53758\end{aligned}$$

Besaran $C_S^2 = 0,289$ dapat diinterpretasikan bahwa analisis lintas tidak dapat menjelaskan keragaman total variabel Y sebesar 0,289 atau 28,9%. Dengan demikian analisis lintas berhasil menjelaskan keragaman total dari Y adalah sebesar $1 - 0,289 = 0,711$ atau 71,1%. Hasil tersebut berbeda dengan hasil koefisien determinasi pada analisis regresi data panel dikarenakan pada hasil analisis regresi masih mengalami bias sehingga secara nyata koefisien determinasi model Indeks Pembangunan Manusia adalah 0,711 atau 71,1%.

C. Diagram Jalur Atau Lintas

Diagram lintas atau jalur merupakan diagram yang tidak terlepas dari analisis jalur dengan tujuan untuk lebih memperjelas uraian yang dikemukakan. Dalam persamaan model kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia maka hasil analisis lintas dapat digambarkan dalam gambar 4.9 sebagai berikut:



Lampiran: M (diolah)

Gambar 4.9: Diagram Lintas Atau Jalur Penelitian

Berdasarkan analisis lintas diketahui bahwa variabel bebas yang memiliki pengaruh langsung paling besar terhadap variabel pada model kemiskinan adalah variabel X_1 yaitu sebesar -1,058 dan pada model kedua yaitu X_1 sebesar 4,282.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* yaitu suatu penelitian yang menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel dalam dua model penelitian yaitu model pertama adalah pengaruh PDRB dan belanja modal yang termasuk variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*) yaitu kemiskinan. Model kedua yaitu, pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan yang merupakan variabel bebas (*Independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilakukan di wilayah Eks Karesidenan Besuki yang meliputi empat kabupaten yaitu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

Dari pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi data panel, secara bersama-sama (Uji F) terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kedua model penelitian dan diperjelas melalui hubungan secara struktural setiap variabel melalui analisis jalur.

4.3.1 Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis uji t dengan menggunakan data panel dapat dijelaskan bahwa variabel PDRB berpengaruh secara signifikan dengan elastisitas positif yaitu, sebesar 0,0000 dan signifikan terhadap tingkat signifikansi 5% (0,05).

Hasil dari analisis lintas dapat dijelaskan pula bahwa besar koefisien lintas variabel PDRB terhadap variabel kemiskinan adalah sebesar -1,058 dengan elastisitas negatif. Hal ini menandakan bahwa apabila terjadi perubahan pada PDRB sebesar 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,058. Pengaruh total variabel PDRB terhadap kemiskinan adalah sebesar 0,537.

Kedua hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB di wilayah Eks Karesidenan Besuki dapat mengurangi kesenjangan diantara kelompok masyarakat. Peningkatan PDRB juga akan merubah struktur ekonomi masyarakat terutama didorong oleh peningkatan pendapatan yang akan membawa perubahan terhadap selera masyarakat dan pola konsumsinya dilihat dari sisi permintaan agregatif. Dari sisi penawaran agregatif faktor utama adalah perubahan atau kemajuan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni'matul Khoiriyah (2014) yang berjudul Analisis Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesejahteraan di Wilayah Eks Karesidenan Besuki yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk tidak hidup konsumtif, melainkan pendapatan yang lebih tersebut dapat disihkan dan ditabung dan digunakan sebagai modal untuk meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori Malthus juga menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mantap dan berkesinambungan tidak mungkin tercapai tanpa penambahan modal yang terus menerus. Sumber akumulasi modal adalah laba, laba berasal dari tabungan pemilik modal. Apabila para pemilik modal lebih banyak menabung dan tidak banyak membeli barang konsumsi lantaran ingin memperoleh

sisalaba lebih besar makan mengakibatkan PDRB menjadi lamban (Jhingan, 2002:98).

4.3.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil uji t analisis data panel menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan yaitu sebesar 0,6341 (p-value diatas 0,05).

Hasil analisis jalur dari pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan memiliki koefisien jalur dengan elastisitas negatif sebesar -0,026 dan lebih kecil dari variabel lain yaitu variabel PDRB terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan hasil regresi data panel bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan. Pengaruh total variabel belanja modal terhadap kemiskinan adalah sebesar 0,092.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan analisis deskriptif dari penelitian Yunita Ardella Putri (2013) yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Pengangguran dan Penduduk Terhadap PDRB Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman” yaitu, kebijakan belanja pemerintah termasuk belanja modal hanya akan mampu mendorong PDRB untuk menciptakan kesejahteraan. Di dalam teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam PDRB dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah untuk kegiatan produktif, misalnya belanja infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan membuka lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

4.3.3 Pengaruh PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan analisis uji t dalam data panel menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki (p-value < 5%).

Hasil analisis jalur atau lintas juga menunjukkan bahwa dalam PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yaitu dengan koefisien lintas sebesar 4,282 dan lebih besar dari variabel lain dalam

penelitian. Apabila PDRB meningkat sebanyak 1% maka akan meningkatkan rasio Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki sebesar 4,282. Pengaruh total variabel PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 0,7485.

Kedua hasil analisis tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh pertumbuhan ekonomi Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari besarnya PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yaitu sebesar 0,153 dan hasil ini juga sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh PDRB terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Profesor Kuznet yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 1997). Pertumbuhan ekonomi perkapita yang dimaksud adalah PDRB, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan konsumsi dalam hal tingkat daya beli masyarakat. Artinya, semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output perkapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat adalah salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

4.3.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis uji t dengan menggunakan data panel dapat dijelaskan bahwa variabel belanja modal berpengaruh secara signifikan yaitu sebesar 0,0105 ($p\text{-value} < 0,05$).

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki yaitu dengan koefisien lintas sebesar 0,509. Hal ini menunjukkan apabila terdapat kenaikan belanja modal sebesar 1 maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,509. Pengaruh total variabel belanja modal mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki adalah sebesar 0,698.

Hasil dari kedua analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia . Hasil ini sejalan dengan penelitian Denni Sulistio Mirza (2012) dengan judul penelitian Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Belanja Modal dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan dengan elastisitas positif yaitu sebesar 0,274 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009 dan sesuai dengan analisis deskriptif penelitian tersebut yang menyatakan bahwa belanja modal diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

4.3.5 Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil regresi data panel variabel kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan yaitu sebesar 0,2678 terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki tahun 2004 sampai 2013.

Berdasarkan analisis jalur menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki koefisien lintas sebesar 0,650. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan apabila pengaruh variabel kemiskinan secara langsung memiliki pengaruh terhadap

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,650 tetapi secara total variabel kemiskinan memiliki koefisien sebesar -0,0536 yang jauh lebih kecil dibandingkan pengaruh total variabel lain dalam penelitian. Hal ini menggambarkan bahwa secara regresi dan struktural variabel kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan apabila perubahan kemiskinan didahului dengan perubahan PDRB untuk mempengaruhi kemiskinan koefisien lintas sebesar -0,435

Hasil analisis tersebut sesuai dengan analisis deskriptif dalam penelitian Fatkhul Mufid Cholili (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Pengangguran, *Product Domestik Regional Bruto* dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi karena Indeks Pembangunan Manusia memiliki 3 komponen dalam mempengaruhi peningkatan terhadap produktivitas masyarakatnya yang ditunjukkan dalam penelitian ini ditunjukkan pada koefisien korelasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempengaruhi IPM. Kuznet (dalam Pramana:2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal pembangunan jumlah kemiskinan akan cenderung meningkat dan pada tahap akhir cenderung berkurang. Pengurangan tersebut akan merubah konsumsi masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat dan berakibat meningkatkan pendapatan

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki selama tahun 2004-2013 di setiap wilayah kabupaten Eks Karesidenan Besuki tidak ada yang berada di lower dan terus mengalami peningkatan dimana Kabupaten Banyuwangi memiliki peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.
2. Pengaruh PDRB, belanja modal terhadap kemiskinan menunjukkan secara analisis regresi data panel menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap kemiskinan berpengaruh secara signifikan dengan taraf 5% di wilayah Eks Karesidenan Besuki dari tahun 2004-2013. Berdasarkan analisis jalur atau lintas dalam penelitian, PDRB memiliki koefisien lintas yang menunjukkan pengaruh langsung dengan elastisitas negatif. Kedua hasil tersebut menunjukkan PDRB yang semakin meningkat akan menurunkan jumlah kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Besuki. Hasil pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan menunjukkan secara analisis regresi tidak memiliki pengaruh secara signifikan dengan taraf 5%. Berdasarkan analisis lintas atau jalur belanja modal memiliki koefisien lintas yang lebih kecil dari variabel lainnya yaitu PDRB. Dari kedua analisis tersebut baik secara regresi maupun struktural pengeluaran belanja pemerintah yaitu belanja modal tidak akan mempengaruhi kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Besuki.
3. Pengaruh PDRB, belanja modal dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan secara regresi PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara struktural yang ditunjukkan dengan hasil analisis lintas menunjukkan koefisien lintas memiliki pengaruh

langsung dan signifikan Variabel PDRB memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dengan merubah variabel kemiskinan. Kedua hasil analisis tersebut menunjukkan PDRB yang semakin meningkat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara regresi berpengaruh secara signifikan dengan taraf 5%. Berdasarkan hasil analisis lintas belanja modal memiliki pengaruh langsung. Pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dengan merubah kemiskinan. Dari kedua hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yaitu belanja modal yang semakin meningkat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Eks Karesidenan Besuki. Pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara regresi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan taraf 5%. Berdasarkan analisis lintas atau jalur kemiskinan memiliki pengaruh langsung. Dari kedua hasil analisis tersebut secara regresi dan struktural dengan melihat pengaruh total menunjukkan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Ek Karesidenan Besuki.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat dikemukakan beberapa saran diantaranya

1. Pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pemerintah daerah di wilayah Eks Karesidenan Besuki harus meningkatkan pertumbuhan output perkapita penduduk. Pertumbuhan output perkapita tersebut adalah PDRB perkapita penduduk. Peningkatan pertumbuhan output tersebut akan mempengaruhi konsumsi penduduk. Perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan mendorong masyarakat tidak hidup konsumtif dan dapat disisihkan untuk ditabung sebagai modal dalam meningkatkan produktivitas dana pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Dalam meningkatkan rasio Indeks Pembangunan Manusia dengan tingginya pertumbuhan output perkapita dan

perubahan pola konsumsi tersebut puladalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga tinggi. Peningkatan daya beli masyarakat tersbut, pada akhirnya meningkatkan rasio Indeks Pembangunan Manusia karena salah satu indikatornya merupakan daya beli.

2. Pengeluaran pemerintah dalam belanja modal untuk meningkatkan rasio Indeks Pembangunan Manusia harus tepat sasaran dimana pengeluaran tersebut harus langsung bersentuhan dengan masyarakat salah satunya yaitu pembangunan infratraktur. Infratraktur yang telah memadai akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga pada akhirnya meningkatkan rasio Indeks Pembagunan Manusia. Pemerintah daerah di wilayah Eks Karesidenan Besuki disarankan pula untuk mempertahankan kemampuan merealisasikan pengalokasian anggaran untuk pengeluaran/ belanja pemerintah ditahun-tahun selanjutnya terutama seperti sarana dan prasrana pendidikan, kesehatan maupun infratraktur lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, edisi ketiga*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur*/Html: www.BPS.go.id (diakses: 30 April 2015)
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Data Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota*. www.BPS.go.id (diakses: 30 April 2015)
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2008. *RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014* <http://bappeda.jatimprov.go.id> (diakses: 30 April 2015)
- Baeti, Nur. 2013. *Pengaruh Pengangguran, pertumbuhan ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Negeri Semarang.
- Chalid, Nursidah dkk. 2014. *Pengaruh Jumlah kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kota/Kabupaten Dan Pertumbuhan ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Universitas Riau.
- Cholili, Fakthul Mufid. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Malang. Universitas Brawijaya
- Franclari, Purwiyanti Septina. 2012. *Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, Dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (studi kasus: 38 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang
- Gujarati. 2004. *Basic Econometrics: Fourth Edition*. The Mac Graw Hill Companies.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika, Buku 1 Edisi. 5*. Jakarta: Salemba Empat.

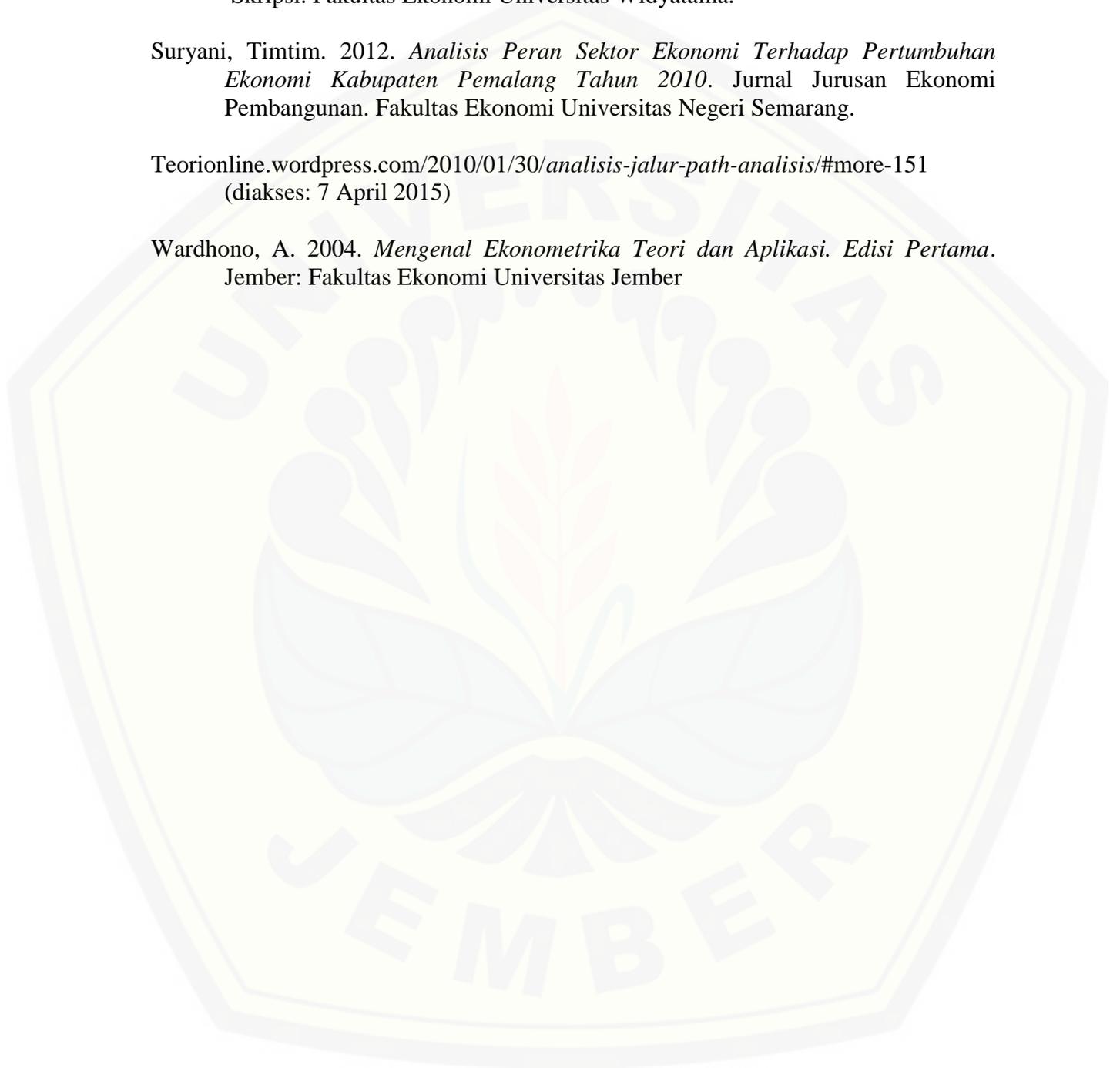
- Khoiryah, Ni'matul. 2014. *Analisis Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesejahteraan di ilayah Eks Karesidenan Besuki Tahun 2004-2011*. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN
- Maryani, Tri. *Analisis Indeks Pembangunan Provinsi Jawa Tengah*. Jurusan Ekonomi Pembangunan UPN "V" Yogyakarta.
- Mankiw, Gregory. *Makroekonomi. Edisi Keenam*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Putri, Yunita Ardella. 2013. *Pengaruh Belanja Modal, Pengangguran dan Penduduk Terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam dan Pasaman*. Padang. Universitas Andalas
- Rejekiingsih, Tri Wahyuni. 2011. *Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Fakultas Diponegoro Universitas Negeri Semarang.
- Santika, Nyoman Lylia. *Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Pembangunan 3 (3) : 106-114. Jurusan Ekonomi Universitas Udayana.
- Setiawan, Mochammad Bhakti. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Sitohang, Christie Martha. *Pengaruh Investasi Swasta Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi.
- Sukmaraga. Prima. 2011. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan ekonomi Per Kapita Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sularno, Fitria Megawati. 2013. *Pengaruh PDRB, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Suryani, Timtim. 2012. *Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemasang Tahun 2010*. Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Teorionline.wordpress.com/2010/01/30/analisis-jalur-path-analisis/#more-151
(diakses: 7 April 2015)

Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember



Lampiran A: Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	Belanja Modal	Kemiskinan	IPM	
Jember	2004	7.821.292,24	108.606.577	430.500	60,9	
	2005	8.236.276,67	78.442.447	408.000	61,72	
	2006	8.705.996,37	237.704.210	423.200	63,04	
	2007	9.283.403,37	232.444.294	417.000	63,27	
	2008	9.039.203,33	274.510.234	399.500	63,71	
	2009	10.429.382,62	226.759.413	348.100	64,33	
	2010	11.550.549,44	80.974.389	311.800	64,95	
	2011	12.359.522,18	210.061.688	292.100	65,53	
	2012	13.250.929,79	372.743.795	277.000	65,99	
	2013	14.165.901,52	517.153.537	278.500	66,6	
	Banyuwangi	2004	8.246.598,38	54.692.409	264.500	65,35
		2005	8.629.977,22	46.258.938	236.100	66,02
		2006	8.803.446,58	153.437.812	251.900	66,8
2007		9.317.782,48	239.535.649	227.300	67,24	
2008		9.863.910,93	161.726.445	206.800	67,8	
2009		10.370.280,26	299.667.852	181.000	68,36	
2010		11.015.195,17	145.857.931	175.100	68,89	
2011		11.804.189,97	250.847.215	164.000	69,58	
2012		12.655.586,32	355.812.307	155.500	70,53	
2013		13.511.707,90	411.268.733	152.200	71,02	
Situbondo	2004	2.710.867,19	29.731.987	169.000	59,94	

	2005	2.856.262,69	19.252.068	113.200	60,23
	2006	2.858.609,20	107.252.829	107.200	61,79
	2007	3.023.332,13	124.143.502	93.900	62,64
	2008	3.715.831,50	134.471.005	108.900	63,06
	2009	3.330.419,83	122.887.794	96.800	63,39
	2010	3.522.055,33	72.033.947	105.200	64,26
	2011	3.744.411,60	120.719.312	98.600	64,67
	2012	3.989.292,96	155.800.530	93.500	65,06
	2013	4.263.528,37	249.807.579	90.300	65,73
Bondowoso	2004	1.699.772,23	25.319.495	383.800	59
	2005	1.792.354,41	28.614.622	169.500	59,9
	2006	2.622.171,38	72.728.259	183.600	60,36
	2007	2.777.065,31	80.968.621	165.700	60,76
	2008	2.924.690,18	88.554.947	152.600	61,26
	2009	2.978.906,80	112.005.479	138.700	62,11
	2010	3.146.982,26	47.599.221	131.900	62,94
	2011	3.341.964,11	169.878.280	123.600	63,81
	2012	3.557.683,76	210.599.591	117.200	64,98
	2013	3.780.574,42	179.134.659	115.300	65,39

Lampiran B: Hasil Logaritma Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	PDRB	Belanja Modal	Kemiskinan	IPM
Jember	2004	6,893278513	8,035856126	5,633973156	60,9
	2005	6,915730927	7,894551133	5,610660163	61,72
	2006	6,939818482	8,376036874	5,626545659	63,04
	2007	6,967707221	8,36631889	5,620136055	63,27
	2008	6,956130156	8,43855854	5,601516784	63,71
	2009	7,018258601	8,355565324	5,541704023	64,33
	2010	7,062602643	7,90834768	5,493876111	64,95
	2011	7,092001681	8,322346851	5,465531557	65,53
	2012	7,122246353	8,571410423	5,442479769	65,99
	2013	7,151244218	8,713619499	5,4448252	66,6
Banyuwangi	2004	6,916274844	7,737927053	5,422425676	65,35
	2005	6,936009649	7,665195658	5,373095987	66,02
	2006	6,944652733	8,185932397	5,401228167	66,8
	2007	6,969312568	8,379370157	5,356599436	67,24
	2008	6,994049142	8,20878104	5,315550534	67,8
	2009	7,015790493	8,476640155	5,257678575	68,36
	2010	7,041992196	8,163930049	5,243286146	68,89
	2011	7,07203619	8,399409284	5,214843848	69,58
	2012	7,10228227	8,551220966	5,191730393	70,53
	2013	7,130710248	8,614125693	5,182414652	71,02
Situbondo	2004	6,433108241	7,473223934	5,227886705	59,94
	2005	6,455798147	7,284477387	5,053846427	60,23

	2006	6,456154787	8,030408756	5,030194785	61,79
	2007	6,480485859	8,093923992	4,972665592	62,64
	2008	6,570056012	8,128628651	5,03702788	63,06
	2009	6,522498984	8,089508748	4,985875357	63,39
	2010	6,546796174	7,857537212	5,02201574	64,26
	2011	6,573383582	8,081776752	4,993876915	64,67
	2012	6,600895931	8,192568931	4,970811611	65,06
	2013	6,629769157	8,39760561	4,95568775	65,73
Bondowoso	2004	6,23039073	7,403455039	5,58410497	59
	2005	6,253423889	7,456588013	5,229169703	59,9
	2006	6,418661073	7,861703191	5,263872677	60,36
	2007	6,443586093	7,908316743	5,219322508	60,76
	2008	6,466079867	7,947212827	5,183554534	61,26
	2009	6,474056916	8,049239268	5,142076461	62,11
	2010	6,497894295	7,677599845	5,120244796	62,94
	2011	6,524001782	8,230137855	5,092018471	63,81
	2012	6,551167341	8,323457523	5,068927612	64,98
	2013	6,577557791	8,253179621	5,061829307	65,39
Varian		0,281784082	0,346643665	0,216533085	3,016708
Rata-Rata		6,748697395	18,0029357	5,266377793	50,72386
Total		269,9478958	324,1056937	210,6551117	2572,91
Simpangan Baku		0,530833384	0,588764524	0,465331156	1,736867

C .Uji Data Panel Model Kemiskinan

Lampiran C.1: Uji Redudant Fixed Effect Model Kemiskinan

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: KEMISKINAN
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	106.756651	(3,34)	0.0000
Cross-section Chi-square	93.747947	3	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KMS?

Method: Panel Least Squares

Date: 09/01/15 Time: 17:19

Sample: 2004 2013

Included observations: 10

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.242640	0.709149	4.572581	0.0001
PE?	0.651291	0.129139	5.043323	0.0000
BM?	-0.292698	0.104976	-2.788229	0.0083

R-squared	0.412418	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.380657	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.170408	Akaike info criterion	-0.629204
Sum squared resid	1.074439	Schwarz criterion	-0.502538
Log likelihood	15.58408	Hannan-Quinn criter.	-0.583406
F-statistic	12.98497	Durbin-Watson stat	0.433944
Prob(F-statistic)	0.000053		

Lampiran C.2: Uji Hausman Test Model Kemiskinan

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: KEMISKINAN

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.052466	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PE?	-0.951619	-0.645210	0.004187	0.0000
BM?	-0.021075	-0.077749	0.000145	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KMS?

Method: Panel Least Squares

Date: 09/01/15 Time: 17:23

Sample: 2004 2013

Included observations: 10

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.85933	0.812963	14.58779	0.0000
PE?	-0.951619	0.154564	-6.156788	0.0000
BM?	-0.021075	0.043876	-0.480328	0.6341

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.943609	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.935316	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.055071	Akaike info criterion	-2.822903
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-2.569571
Log likelihood	62.45805	Hannan-Quinn criter.	-2.731306
F-statistic	113.7857	Durbin-Watson stat	2.347260
Prob(F-statistic)	0.000000		

D. Uji Data Panel Model IPM

Lampiran D.1: Uji Redudant Fixed Effect Model IPM

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: IPM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	24.723463	(3,33)	0.0000
Cross-section Chi-square	47.116497	3	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IPM?

Method: Panel Least Squares

Date: 09/01/15 Time: 20:09

Sample: 2004 2013

Included observations: 10

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.73717	6.216690	4.783440	0.0000
PE?	11.01750	1.175502	9.372588	0.0000
BM?	0.648886	0.809201	0.801886	0.4279
KMS?	-8.549687	1.151995	-7.421633	0.0000

R-squared	0.855371	Mean dependent var	64.32275
Adjusted R-squared	0.843319	S.D. dependent var	3.016708
S.E. of regression	1.194102	Akaike info criterion	3.287306
Sum squared resid	51.33170	Schwarz criterion	3.456194
Log likelihood	-61.74612	Hannan-Quinn criter.	3.348371
F-statistic	70.97109	Durbin-Watson stat	0.314525
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D.2: Uji Hausman Test Model IPM

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: IPM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	74.170388	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PE?	14.011057	11.017500	7.515187	0.2748
BM?	1.502103	0.648886	0.086141	0.0036
KMS?	-2.429141	-8.549687	4.199199	0.0028

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM?

Method: Panel Least Squares

Date: 09/01/15 Time: 20:13

Sample: 2004 2013

Included observations: 10

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.61186	27.52572	-1.075789	0.2898
PE?	14.01106	2.824775	4.960061	0.0000
BM?	1.502103	0.553263	2.714990	0.0105
KMS?	-2.429141	2.155223	-1.127095	0.2678

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.955466	Mean dependent var	64.32275
Adjusted R-squared	0.947369	S.D. dependent var	3.016708
S.E. of regression	0.692079	Akaike info criterion	2.259394
Sum squared resid	15.80610	Schwarz criterion	2.554948
Log likelihood	-38.18787	Hannan-Quinn criter.	2.366257
F-statistic	118.0006	Durbin-Watson stat	0.875770
Prob(F-statistic)	0.000000		

E. Analisis Regresi Data Panel

Lampiran E.1: Hasil Regresi Data Panel Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 09/01/15 Time: 17:26
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.85933	0.812963	14.58779	0.0000
PE?	-0.951619	0.154564	-6.156788	0.0000
BM?	-0.021075	0.043876	-0.480328	0.6341
Fixed Effects (Cross)				
JEMBER—C	0.536340			
BANYUWANGI—C	0.283225			
SITUBONDO—C	-0.455404			
BONDOWOSO—C	-0.364161			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.943609	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.935316	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.055071	Akaike info criterion	-2.822903
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-2.569571
Log likelihood	62.45805	Hannan-Quinn criter.	-2.731306
F-statistic	113.7857	Durbin-Watson stat	2.347260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran E.2: Hasil Regresi Data Panel Model Indeks Pembangunan Manusia

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 09/01/15 Time: 20:18
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.61186	27.52572	-1.075789	0.2898
PE?	14.01106	2.824775	4.960061	0.0000
BM?	1.502103	0.553263	2.714990	0.0105
KMS?	-2.429141	2.155223	-1.127095	0.2678
Fixed Effects (Cross)				
JEMBER—C	-3.615959			
BANYUWANGI—C	0.010721			
BONDOWOSO—C	1.485381			
SITUBONDO—C	2.119857			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.955466	Mean dependent var		64.32275
Adjusted R-squared	0.947369	S.D. dependent var		3.016708
S.E. of regression	0.692079	Akaike info criterion		2.259394
Sum squared resid	15.80610	Schwarz criterion		2.554948
Log likelihood	-38.18787	Hannan-Quinn criter.		2.366257
F-statistic	118.0006	Durbin-Watson stat		0.875770
Prob(F-statistic)	0.000000			

F. Uji F

Lampiran F.1: Uji F Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?

Method: Pooled Least Squares

Date: 09/01/15 Time: 17:26

Sample: 2004 2013

Included observations: 10

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 40

R-squared	0.943609	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.935316	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.055071	Akaike info criterion	-2.822903
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-2.569571
Log likelihood	62.45805	Hannan-Quinn criter.	-2.731306
F-statistic	113.7857	Durbin-Watson stat	2.347260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran F.2: Uji F Model IPM

Dependent Variable: IPM?

Method: Pooled Least Squares

Date: 09/01/15 Time: 20:18

Sample: 2004 2013

Included observations: 10

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 40

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.955466	Mean dependent var	64.32275
Adjusted R-squared	0.947369	S.D. dependent var	3.016708
S.E. of regression	0.692079	Akaike info criterion	2.259394
Sum squared resid	15.80610	Schwarz criterion	2.554948
Log likelihood	-38.18787	Hannan-Quinn criter.	2.366257
F-statistic	118.0006	Durbin-Watson stat	0.875770
Prob(F-statistic)	0.000000		

G. Uji t

Lampiran G.1: Uji t Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 09/01/15 Time: 17:26
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.85933	0.812963	14.58779	0.0000
PE?	-0.951619	0.154564	-6.156788	0.0000
BM?	-0.021075	0.043876	-0.480328	0.6341

Lampiran G.2: Uji t Model IPM

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 09/01/15 Time: 20:18
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-29.61186	27.52572	-1.075789	0.2898
PE?	14.01106	2.824775	4.960061	0.0000
BM?	1.502103	0.553263	2.714990	0.0105
KMS?	-2.429141	2.155223	-1.127095	0.2678

H. Koefisien Determinasi

Lampiran H.1: Uji Koefisien Determinasi Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 09/01/15 Time: 17:26
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.943609	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.935316	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.055071	Akaike info criterion	-2.822903
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-2.569571
Log likelihood	62.45805	Hannan-Quinn criter.	-2.731306
F-statistic	113.7857	Durbin-Watson stat	2.347260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran H.2: Uji Koefisien Determinasi Model IPM

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 09/01/15 Time: 20:18
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.955466	Mean dependent var	64.32275
Adjusted R-squared	0.947369	S.D. dependent var	3.016708
S.E. of regression	0.692079	Akaike info criterion	2.259394
Sum squared resid	15.80610	Schwarz criterion	2.554948
Log likelihood	-38.18787	Hannan-Quinn criter.	2.366257
F-statistic	118.0006	Durbin-Watson stat	0.875770
Prob(F-statistic)	0.000000		

I. Uji Multikolineritas

Lampiran I.1: Uji Multikolineritas Model Kemiskinan

	PERTUMBUHAN_EKONOMI	BELANJA_MODAL
PERTUMBUHAN_EKONOMI	1.000000	0.661591
BELANJA_MODAL	0.661591	1.000000

Lampiran I.2: Uji Multikolineritas Model IPM

	PERTUMBUHAN_EKONOMI	BELANJA_MODAL	KEMISKINAN
PERTUMBUHAN_EKONOMI	1.000000	0.661591	0.537549
BELANJA_MODAL	0.661591	1.000000	0.092159
KEMISKINAN	0.537549	0.092159	1.000000

J. Uji Heteroskedastisitas

Lampiran J.1: Uji Heteroskedastisitas Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 09/01/15 Time: 17:39
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.972531	Mean dependent var	8.037189
Adjusted R-squared	0.968492	S.D. dependent var	4.184791
S.E. of regression	0.054307	Sum squared resid	0.100275
F-statistic	240.7536	Durbin-Watson stat	1.691962
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.943089	Mean dependent var	5.266378
Sum squared resid	0.104067	Durbin-Watson stat	2.306838

Lampiran J.2: Uji Heteroskedastisitas Model IPM

Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
 Date: 09/01/15 Time: 20:28
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40
 Linear estimation after one-step weighting matrix

Weighted Statistics			
R-squared	0.982492	Mean dependent var	89.61603
Adjusted R-squared	0.979308	S.D. dependent var	42.95209
S.E. of regression	0.641069	Sum squared resid	13.56201
F-statistic	308.6384	Durbin-Watson stat	1.109223
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.951967	Mean dependent var	64.32275
Sum squared resid	17.04777	Durbin-Watson stat	0.881240

K. Uji Autokorelasi

Lampiran K.1: Uji Autokorelasi Model Kemiskinan

Dependent Variable: KMS?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 09/01/15 Time: 17:46
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.943609	Mean dependent var	5.266378
Adjusted R-squared	0.935316	S.D. dependent var	0.216533
S.E. of regression	0.055071	Akaike info criterion	-2.822903
Sum squared resid	0.103116	Schwarz criterion	-2.569571
Log likelihood	62.45805	Hannan-Quinn criter.	-2.731306
F-statistic	113.7857	Durbin-Watson stat	2.347260
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran K.2: Uji Autokorelasi Model IPM

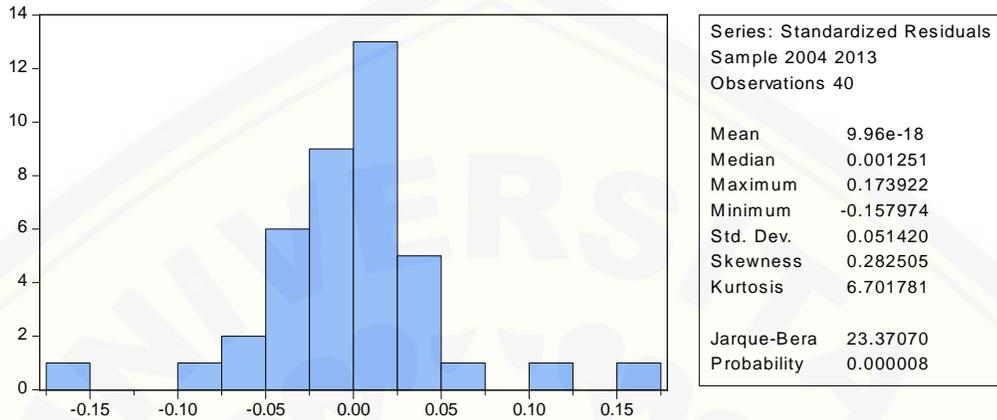
Dependent Variable: IPM?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 09/01/15 Time: 20:31
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 4
 Total pool (balanced) observations: 40

Cross-section fixed (dummy variables)

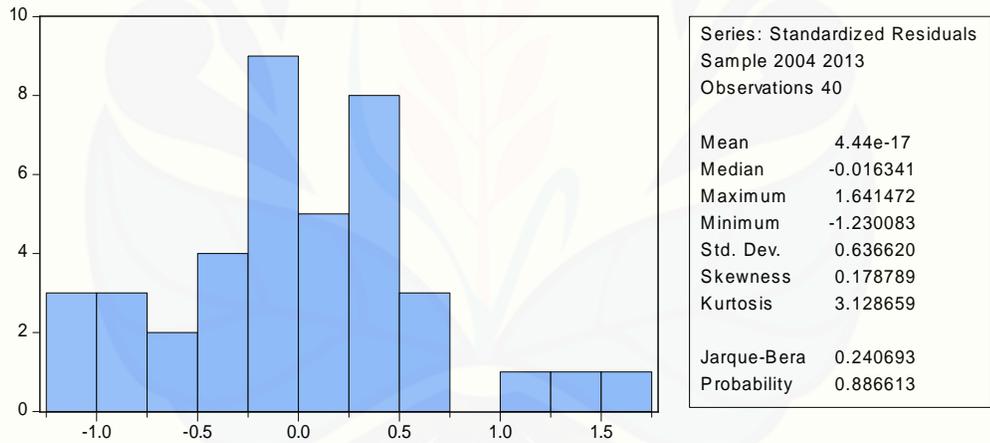
R-squared	0.955466	Mean dependent var	64.32275
Adjusted R-squared	0.947369	S.D. dependent var	3.016708
S.E. of regression	0.692079	Akaike info criterion	2.259394
Sum squared resid	15.80610	Schwarz criterion	2.554948
Log likelihood	-38.18787	Hannan-Quinn criter.	2.366257
F-statistic	118.0006	Durbin-Watson stat	0.875770
Prob(F-statistic)	0.000000		

L. Uji Normalitas

Lampiran L.1: Uji Normalitas Model Kemiskinan



Lampiran L.2: Uji Normalitas Model IPM



M. Uji Path

Lampiran M: Hasil Uji Path

Variabel bebas dibakukan	Pengaruh langsung (Z)	Pengaruh langsung (X_4/Y)	Pengaruh tidak langsung melalui Z_3	Pengaruh total (Z) dan (X_4/Y)
X_1	-1,058	4,282	-0,4305	0,5375 dan 0,7485
X_2	-0,026	0,509	-0,059	0,0921 dan 0,698
Z	-	0,6508	-	-0,0536

